

**THE WORLD BANK GROUP ARCHIVES**

**PUBLIC DISCLOSURE AUTHORIZED**

**Folder Title:** Pola Pelaksanaan - Transmigrasi Umum Resettlement Transmigrasi Lokal di Daerah Lampung - 1983 - Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Satbintrans

**Folder ID:** 30096988

**Series:** Indonesia project and research reports (Bahasa)

**Dates:** 01/01/1983 - 12/31/1983

**Fonds:** Personal papers of Gloria Davis

**ISAD Reference Code:** WB IBRD/IDA DAVIS-12

**Digitized:** 05/05/2023

To cite materials from this archival folder, please follow the following format:  
[Descriptive name of item], [Folder Title], Folder ID [Folder ID], ISAD(G) Reference Code [Reference Code], [Each Level Label as applicable], World Bank Group Archives, Washington, D.C., United States.

The records in this folder were created or received by The World Bank in the course of its business.

The records that were created by the staff of The World Bank are subject to the Bank's copyright.

Please refer to <http://www.worldbank.org/terms-of-use-earchives> for full copyright terms of use and disclaimers.



THE WORLD BANK

Washington, D.C.

© International Bank for Reconstruction and Development / International Development Association or

The World Bank

1818 H Street NW

Washington DC 20433

Telephone: 202-473-1000

Internet: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

**PUBLIC DISCLOSURE AUTHORIZED**



 **Archives**  **30096988**  
A2011-001 Other #: **358840B**  
Pola Pelaksanaan - Transmigrasi Umum Resettlement Transmigrasi Lokal di Daerah Lampung - 1983 - Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Satbintrans

**DECLASSIFIED**  
WBG Archives  
WBG Archives

**DECLASSIFIED**  
WBG Archives

*POLA PELAKSANAAN*  
**TRANSMIGRASI UMUM**  
**RESETTLEMENT**  
**TRANSMIGRASI LOKAL**  
*DI DAERAH LAMPUNG*



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
SATBINTRANS I LAMPUNG  
1983

*POLA PELAKSANAAN*  
**TRANSMIGRASI UMUM**  
**RESETTLEMENT**  
**TRANSMIGRASI LOKAL**  
*DI DAERAH LAMPUNG*

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**  
**SATBINTRANS I LAMPUNG**  
**1983**



**YASIR HADIBROTO**  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG

## P E N G A N T A R

Daerah Lampung merupakan salah satu daerah penerima Transmigrasi yang tertua di Indonesia.

Untuk mengetahui perkembangan lanjut Transmigrasi di daerah Lampung kami susun buku ini, semoga dapat digunakan bagi kepentingan pembangunan.

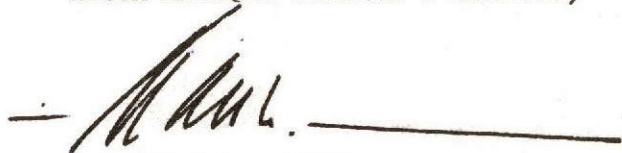
Disamping itu sasaran penting yang ingin dicapai dengan disusunnya buku ini, adalah sebagai informasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dalam rangka pemikiran untuk mencapai sasaran yang ditentukan, karena program Transmigrasi, sebagai suatu paket program memiliki sasaran ganda, dan untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan koordinasi yang ketat pada seluruh aparat pelaksanaan.

Buku ini dimaksudkan pula sebagai media pengetahuan dalam pembinaan dan pengembangan Transmigrasi umum, Resettlement dan Transmigrasi lokal ( Translok ) di daerah Lampung.

Semoga bermanfaat.

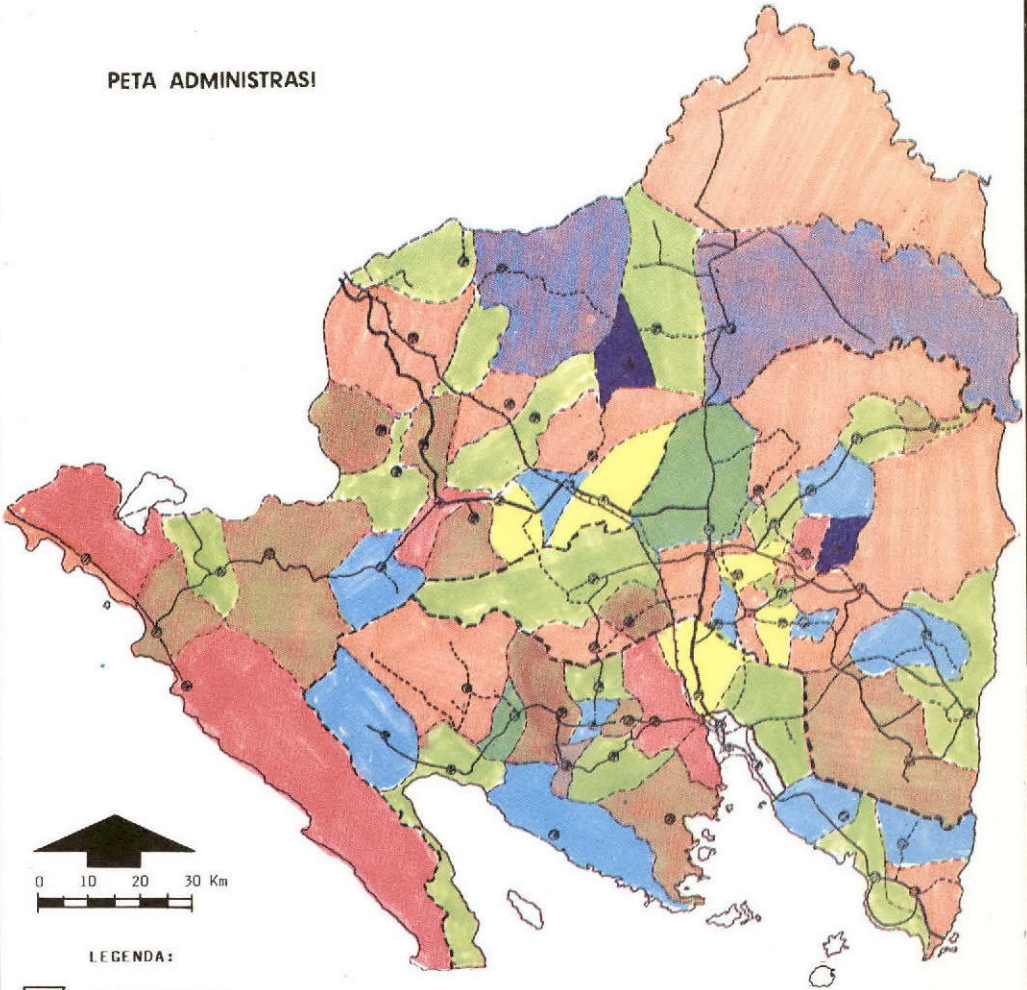
Telukbetung, Agustus 1983.

KETUA BAPPEDA TINGKAT I LAMPUNG,












Drs. MAN HASAN

# PETA ADMINISTRASI



## LEGENDA:

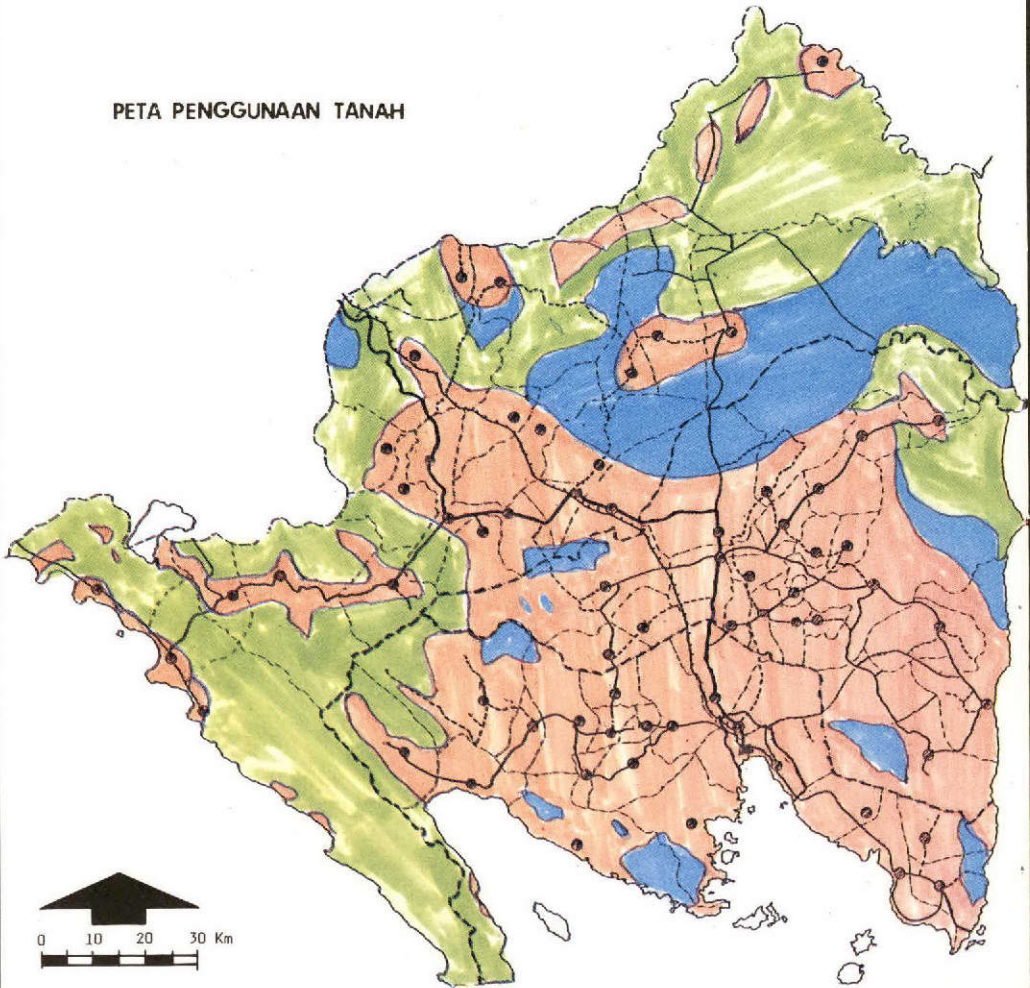
-  IBUKOTA PROPINSI
-  IBUKOTA KABUPATEN
-  IBUKOTA KECAMATAN
-  BATAS PROPINSI
-  BATAS KABUPATEN
-  BATAS KECAMATAN
-  JALAN NEGARA
-  JALAN PROPINSI
-  JALAN KABUPATEN

## DAFTAR ISI










1. KATA PENGANTAR.....	i
2. DAFTAR ISI.....	ii
3. PENDAHULUAN.....	1
4. PELAKSANAAN TRANSMIGRASI SEBELUM PELITA.....	5
5. PELAKSANAAN TRANSMIGRASI UMUM SEBELUM U.U No. 3/1972.....	7
6. PELAKSANAAN TRANSMIGRASI PADA PELITA I.....	10
7. PELAKSANAAN TRANSMIGRASI PADA PELITA II.....	13
8. POLA RESETTLEMENT.....	16
9. POLA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI LOKAL.....	28
10. KESIMPULAN.....	45
11. INSTRUKSI GUBERNUR / KDH TINGKAT I LAMPUNG..	51






# PETA PENGGUNAAN TANAH



## LEGENDA:

-  IBUKOTA PROPINSI
-  IBUKOTA KABUPATEN
-  IBUKOTA KECAMATAN
-  BATAS PROPINSI
-  BATAS KABUPATEN
-  BATAS KECAMATAN
-  JALAN NEGARA
-  JALAN PROPINSI
-  JALAN KABUPATEN

-  Kampung, Tegai, Sawah, Kebun Campuran, Perkebunan.
-  Hutan/Semak belukar.
-  Hutan lebat, Rawa.

## PENDAHULUAN

Program nasional Transmigrasi sebagai bagian integral dari pembangunan daerah, pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan usaha dalam melaksanakan pembangunan daerah dan tujuan mensukseskan pembangunan daerah melalui penyediaan sarana tenaga kerja trampil dibidang pengelolaan sumber - sumber alam dengan menitik beratkan pada pengembangan usaha pertanian.

Transmigrasi merupakan salah satu objek dalam kebijaksanaan kependudukan yang merupakan masalah penting dan saling mengkait hampir dengan seluruh bidang kegiatan nasional.

Transmigrasi adalah satu sistim pembangunan yang merangkum seperangkat prinsip dan metode untuk menyelenggarakan pemukiman dan kehidupan baru bagi suatu kelompok.

Transmigrasi sebagai suatu sistim menunjuk berbagai daya upaya dan disiplin ilmiah yang dipadukan dalam satu keseluruhan usaha yang berhubungan dengan pemindahan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional, pembangunan tenaga manusia dan pengembangan potensi kekayaan alam dalam kaitannya dengan pembangunan Ketahanan Nasional.

Titik tolak penyelenggaraan Transmigrasi adalah manusia, dan oleh karenanya metode pendekatan penyelenggaraan transmigrasi harus manusiawi, agar pengembangan nilai normatif, pola sikap, pola pikir dan pola tindak tidak akan menjurus kearah terciptanya kerawanan sosial dalam menciptakan manusia baru, da-

lam hubungan dan interaksi sosial melalui proses difusi intra masyarakat dan antar masyarakat. Penyelenggaraan Transmigrasi adalah untuk mengatur masalah pemerataan penduduk, baik dalam rangka mengurangi kepadatan kependudukan didaerah padat, maupun menambah jumlah penduduk atau mempertinggi kepadatan di daerah jarang/tipis penduduk, sebab kadang kala pembangunan terlambat disebabkan tidak saja oleh terlalu padatnya penduduk tetapi juga oleh terlalu jarang/tipisnya penduduk.

Sehubungan dengan hal tersebut tentunya akan berkaitan pula dengan pelaksanaan pemerataan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya terhadap golongan masyarakat yang selama ini kurang terjangkau akan fasilitas pembangunan sosial ekonomi secara optimal.

Dalam rangka kehidupan nasional usaha dan kegiatan Transmigrasi merupakan penupukan solidaritas sosial yang berfungsi membangkitkan kemampuan swadaya masyarakat.

Program Transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan daerah produksi pertanian dalam rangka pembangunan daerah yang dapat menjamin meningkatkan taraf hidup Transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Sejalan dengan tujuan program Transmigrasi yang merupakan program nasional, tujuan pembangunan daerah Lampung adalah untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.

Usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut melalui kebijaksanaan program yang diarahkan pada penggalan seluruh kekayaan yang ada didaerah, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia maupun

sumber daya lainnya tanpa mengabaikan prinsip keseimbangan lingkungan hidup.

Program Transmigrasi menyangkut ruang lingkup yang luas antar berbagai sektor pembangunan sosial ekonomi. Dengan demikian jelaslah bahwa keberhasilan program Transmigrasi perlu didukung, baik melalui Departement Transmigrasi dan Departemen lain dan peran serta masyarakat terutama dari sudut pembinaan dan pengembangannya.

Koordinasi antar Departemen sejak penelitian, pengiriman, penempatan dan pembinaan Transmigrasi mutlak diperlukan untuk keberhasilan program tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sedangkan keberhasilan pembangunan desa Transmigrasi, tergantung akan adanya motivasi yang tinggi pada diri Transmigran untuk membangun desa dan masyarakatnya, disamping peranan pemerintah lebih banyak memberikan stimulan dan berbagai fasilitas kemudahan untuk penyaluran keringanan masyarakat Transmigrasi.

Pola pelaksanaan Transmigrasi di daerah Lampung sampai dengan akhir Pelita II dilaksanakan oleh Dirjen Transmigrasi, dan juga oleh Dinas/Instansi/Lembaga lain, seperti Sosial, Angkatan Darat/Angkatan Udara, Polri dan Pramuka. Sasaran pelaksanaan Transmigrasi umum adalah pemindahan penduduk dari Jawa dan Bali ( daerah padat penduduk ) ke daerah Lampung dimana daerah Lampung telah ditetapkan sebagai daerah penerima Transmigrasi, karena daerah Lampung termasuk daerah yang dianggap tipis penduduk.

Awal Pelita III, pelaksanaan Transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena daerah Lampung tertutup untuk Transmigrasi umum, akibat migrasi penduduk yang cukup tinggi dan tak terkendali, melalui program Resettlement yang kemudian dilanjutkan dengan Transmigrasi lokal ( Translok ).

Migrasi penduduk ke daerah Lampung, disebabkan karena daerah Lampung dianggap daerah harapan bagi pendatang, disamping keberhasilan pembangunan daerah yang dilaksanakan, dimana fasilitas pembangunan ditujukan untuk menunjang tingkat produktivitas pertanian dan lalu lintas hasil produksi pertanian dalam usaha mengembangkan daerah Lampung sebagai daerah kantong produksi pertanian bagi daerah/propinsi lainnya.








Hal ini mengakibatkan penduduk daerah padat berlomba untuk berusaha tani di daerah Lampung dengan tidak memperhitungkan posisi dan kondisi lahan usaha tani yang ada.

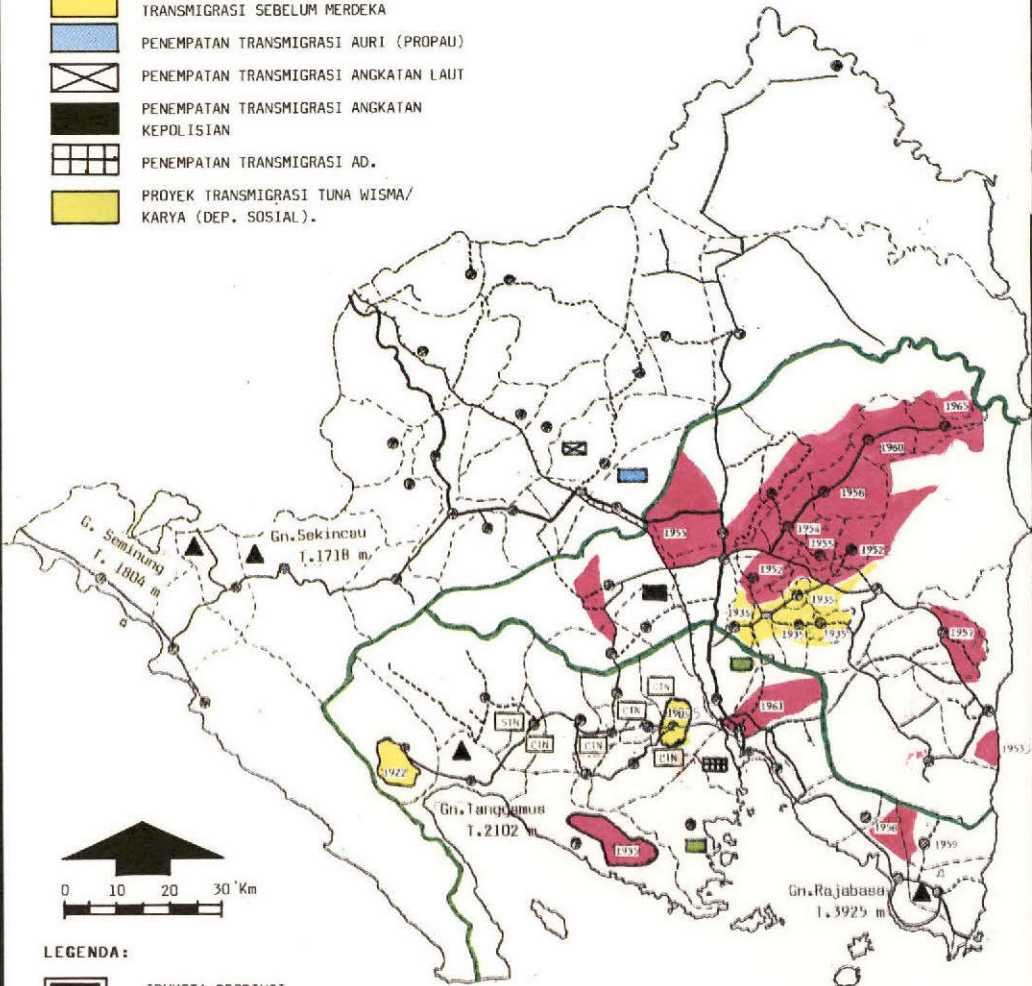
Sebagian besar penduduk pendatang lainnya bermodalkan semangat yang tidak dilengkapi ketrampilan berusaha tani dan akhirnya hanya mampu berusaha tani dengan menggunakan pola usaha tani berpindah-pindah yang mengakibatkan kerusakan hutan, erosi tanah dan berkurangnya kesuburan tanah di beberapa tempat.

Sasaran Resettlement dan Transmigrasi lokal (Translok) adalah memindahkan penduduk yang bermukim dan berusaha tani di daerah kawasan hutan / daerah aliran sungai, dan dipindahkan ke daerah yang ditetapkan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Lampung dalam rangka usaha melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.










Dengan memindahkan penduduk yang bermukim dan berusaha tani di daerah kawasan hutan, diharapkan Rehabilitasi kawasan hutan yang rusak melalui program Reboisasi, hutan dapat dilestarikan kembali, dan penduduk ex kawasan hutan dapat dengan nyaman mengerjakan lahan usaha tani yang telah diberikan kepadanya, dan dengan demikian diharapkan akan terbuka daerah potensi baru pada daerah penempatan yang ditetapkan. Disamping terciptanya penyebaran penduduk yang berimbang antara daerah Tingkat II di daerah Lampung.

## PETA TRANSMIGRASI UMUM

-  PROYEK TRANSMIGRASI TELAH DISERAHKAN PADA PEMDA
-  TRANSMIGRASI SEBELUM MERDEKA
-  PENEMPATAN TRANSMIGRASI AURI (PROPAU)
-  PENEMPATAN TRANSMIGRASI ANGKATAN LAUT
-  PENEMPATAN TRANSMIGRASI ANGKATAN KEPOLISIAN
-  PENEMPATAN TRANSMIGRASI AD.
-  PROYEK TRANSMIGRASI TUNA WISMA/ KARYA (DEP. SOSIAL).



### LEGENDA:

-  IBUKOTA PROPINSI
-  IBUKOTA KABUPATEN
-  IBUKOTA KECAMATAN
-  BATAS PROPINSI
-  BATAS KABUPATEN
-  BATAS KECAMATAN
-  JALAN NEGARA
-  JALAN PROPINSI
-  JALAN KABUPATEN

## PELAKSANAAN TRANSMIGRASI SEBELUM PELITA

Daerah Lampung merupakan salah satu daerah penerima Transmigrasi yang tertua di Indonesia yaitu sejak zaman kolonial disebut dengan istilah kolonisasi, tepatnya sejak tahun 1905, dengan maksud untuk mengisi tenaga kerja perkebunan.

Kolonisasi yang dilaksanakan Pemerintah Belanda ditempatkan di daerah Lampung Selatan dan Lampung Tengah.

- a. Tahun 1905 penempatan Gedong Tataan dan Gading Rejo Lampung Selatan.
- b. Tahun 1922 penempatan didaerah Wonosobo Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Tahun 1935 penempatan didaerah Metro, Sekampung, Trimurjo, Batanghari Kabupaten Lampung Tengah.

Pemindahan penduduk yang dilaksanakan pada zaman penjajahan Belanda dan dimulainya kolonisasi ini pada tahun 1905-1911 atau priode I ( pertama ) dan pembiayaan untuk kepindahan para Transmigrasi tersebut dijamin oleh Pemerintah Hindia Belanda seluruhnya, sedangkan pada priode II dilaksanakan pada tahun 1912-1922 dengan sistim UTANG, dimana para Transmigran mendapat pinjaman dari Bank Lampung Sdhe Bank atau kita kenal sekarang Bank Rakyat.

Pelaksanaan priode ke III pada tahun 1932-1942 dimana Pemerintah Hindia Belanda memindahkan para Transmigran dengan memakai sistim B A W O N artinya upah kerja dalam bentuk natura, dimana pembiayaan dipikul oleh para Kolonis-kolonis itu sendiri.

Kegiatan Transmigrasi dilanjutkan pada zaman kemerdekaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam kaitannya dengan pembangunan.

Penyelenggaraan Transmigrasi pertama sesudah zaman kemerdekaan didaerah Lampung yaitu pada tahun 1950 dengan pengiriman 53 KK ( 77 Jiwa ) ke Lampung yang merupakan Transmigrasi keluarga kolonisasi lama yang minta didatangkan dengan perantaraan Jawatan Transmigrasi.

Transmigrasi umum baru dilaksanakan oleh Pemerintah pada tahun 1952. Penempatannya menyebar ketiga Kabupaten dan untuk Kabupaten Dati II Lampung Selatan di tempatkan di Palas, Sidomulyo, Balau, Kedaton, Tanjungan, Sidomakmur Bangun, Bawang I dan II, Sukaraja Bawang, Purwodadi I dan II dengan jumlah 6.098 KK atau 25.278 jiwa, sedangkan di Lampung Tengah ditempatkan di Sekampung, Purbolinggo, Punggur, Pekalongan, Labuhan Maringgai, Seputih Raman, Raman Utara, Seputih Banyak, Rumbia, Lempuyang, Way Jepara Seputih Mataram dan Seputih Surabaya dengan jumlah 42.778 KK atau 157.580 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Dati II Lampung Utara ditempatkan di Baradatu, Banjid, dan Negeri Agung, Way Abung I dan II sebanyak 8.912 KK atau 38.528 Jiwa.

Dengan demikian penempatan Transmigrasi sebelum Pelita sebanyak 57.988 KK atau 221.386 Jiwa dan dengan perincian seperti pada tabel ( 1 ).

Tabel. 1

No.	Tahun Penempatan	Lokasi Penempatan	Jumlah		Ket
			KK	Jiwa	
1.	1952 - 1969	Lam Teng	42.978	157.580	
2.	1958 - 1969	Lam Sel	6.098	25.278	
3.	1950 - 1969	Lam Utara	8.912	38.528	
Jumlah			57.988	221.386	



Pada penempatan sebelum Pelita yang diserahkan pembinaan selanjutnya pada Pemerintah Daerah sejak diserahkan terimakan tahun 1970 dan 1976, lokasi-lokasi tersebut berkembang menjadi Kecamatan a.l : Baradatu, Banjit, Palas, Sidomulyo, Purbolinggo, Sekampung, Punggur, Pekalongan, Labuhan Maringgai, Seputih Raman, Rumbia, Seputih Banyak.

### **PELAKSANAAN TRANSMIGRASI UMUM SEBELUM U.U. No. 3 / 1972.**

Sebelum Undang-Undang No.3 tahun 1972 di Propinsi Lampung terdapat 21 (dua puluh satu) jenis Transmigrasi yang diselenggarakan oleh bermacam - macam Instansi antara lain Ditjen Transmigrasi, Ditjen Sosial, Hankam, Kwarnas, Pramuka, Integrasi A B R I , Pamen, BANPRES, Polri, Famili.

Karena beragamnya jenis Transmigrasi tersebut, maka beragam pula fasilitas dan teknik penyelenggaraannya, sehingga hasil pembinaannya akan berbeda - beda pula dan menyulitkan Pemerintah Daerah untuk membina dan mengembangkannya.

Setelah Undang-Undang No.3 tahun 1972 penyelenggaraan Transmigrasi hanya dilakukan oleh Ditjen Transmigrasi dan saat itulah penyelenggaraan Transmigrasi mulai teratur.

Pelaksanaan Transmigrasi yang dilakukan sebelum Undang - Undang No.3 tahun 1972 oleh berbagai Dinas/ Instansi dan lembaga di daerah Lampung seperti pada tabel (2).

Tabel. 2

No.	Tahun	Jenis Transmigrasi	Jumlah		Lokasi Penempatan
			KK	Jiwa	
1.	1964/1974	A D	1.586	17.707	Panjang, Terbanggi Besar
2.	1969/1974	Sosial	4.405	7.362	Bawang I, II, Palas, Penengahan
3.	1971/1974	P o l r i	537	2.300	Jaya Guna I, II
4.	1971	A U	937	5.948	Kotabumi, Kalibalangan
5.	1973/1974	A B R I	187	1.418	Tl. Bawang Tengah
6.	1973/1974	A B R I	2.042	9.357	Kotabumi, Tl. Bawang Udik, Sungai Selatan
7.	1973/1975	BANPRES	913	3.776	Padang Ratu, Sukadana
8.	1973/1974	Pramuka	134	820	Rajabasa Lama, Gedong - dalam.
9.	1976/1978	Interansau	2.500	8.882	Purwajaya, Menggala.
10.	1978/1980	Interansau	2.000	14.373	Kibang, Menggala, Balai-Murni
Jumlah			15.241	71.945	

Kegiatan pelaksanaan Transmigrasi yang dilakukan Dinas/Instansi dan lembaga baik penempatan maupun pembinaan dilaksanakan masing-masing Dinas/Instansi dan lembaga tersebut, kurang terlihat koordinasi pelaksanaan dan pembinaan dengan Dirjen Transmigrasi.

Oleh karena itu kecepatan perkembangan masing-masing desa Transmigrasi baik dalam pembangunan desa dan masyarakat ada yang lambat dan ada yg cepat perkembangannya, seperti Transmigrasi Pramuka di desa Rajabasa lama Kecamatan Sukadana bila dibandingkan dengan Transmigrasi Angkatan Darat di Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar.

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam kaitan pembangunan desa Transmigrasi tersebut, selain mengarahkan pembangunan sosial ekonomi pada desa Transmigrasi tersebut, juga bantuan fasilitas pembangunan untuk dapat berimbang baik pembangunan desanya maupun pembangunan masyarakatnya.

Dengan demikian untuk lebih terarah pelaksanaan dan pembinaan Transmigrasi di daerah, dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1972, maka pelaksanaan dan pembinaan Transmigrasi dikoordinasikan melalui Dirjen Transmigrasi dan berlanjut dengan pola Satuan Pembinaan Transmigrasi dengan Gubernur/Kepala Daerah selaku Ketua Satuan Pembinaan Transmigrasi.

Dengan pola Satuan Pembinaan Transmigrasi (Satbintrans), semua permasalahan dapat segera dideteksi dan dicarikan pemecahan masalahnya sehingga arah pembinaan para Transmigrasi dapat dicapai melalui keterpaduan Dinas/Instansi dalam penanganan pelaksanaan dan pembinaan Transmigrasi.

Melalui keterpaduan program, masalah yang berkaitan antar Dinas/Instansi dalam rangka pembinaan

daerah Transmigrasi dapat segera ditanggulangi dan dampak sosial yang timbul akibat belum adanya adaptasi lingkungan masyarakat Transmigrasi, dapat diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif.

### PELAKSANAAN TRANSMIGRASI PADA PELITA I

Pada Pelita I target penempatan Transmigrasi 11.762 KK dan realisasi mencapai 19.711 KK atau 86.003. Jiwa.

Realisasi penempatan yang melebihi target disebabkan adanya penambahan Transmigrasi spontan dan Transmigrasi keluarga yang diatur dengan pola sisispan.

Untuk lebih jelasnya seperti tertera pada tabel ( 3 ) dibawah Ini :

Tabel. 3

No.	Tahun Penempatan	Lokasi Penempatan	Jumlah	
			KK	Jiwa
1.	1970 - 1974	Lam. Sel	2.305	7.321
2.	1973 - 1974	Lam. Teng.	974	3.878
3.	1970 - 1974	Lam. Utara	16.459	74.804
J U M L A H			19.711	86.003

Proyek Transmigrasi yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah pada Pelita I, dan diserahkan pada tahun 1980, Lampung Selatan 2.305 KK/7.321, Lampung Tengah 947 KK/3.878 jiwa dan Lampung Utara 636 KK/2.364 Jiwa.

Dari Proyek Transmigrasi Pelita I yang sangat menonjol perkebunannya adalah Way Abung I dan II

dengan tahun penempatan 1965, 1972 dan 1974 sebanyak 12.745 KK atau 57.468 Jiwa.

Pada Pelita I rata-rata proyek Transmigrasi di serahkan pada Pemerintah Daerah, setelah dilakukan pembinaan secara terus-menerus selama 7 tahun, walaupun menurut ketentuan setelah 5 tahun dalam pembinaan Dirjen Transmigrasi di serahkan pada Pemerintah Daerah.

## SITUASI SOSIAL EKONOMI DI PROYEK TRANSMIGRASI

Umumnya mata pencaharian para Transmigrasi yang pokok adalah bertani, untuk menambah penghasilan, mereka melakukan pekerjaan sampingan antara lain , membuka warung, pertukangan kayu, membuat bata/gen - ting dan buruh.

### a. Keadaan pertanian

1. Areal pertanian yang digarap.  
Areal pertanian yang telah digarap (Produktif) umumnya terdiri dari pekarangan.  
Menurut Laporan Dirjen Transmigrasi tahun 1977 rata-rata per KK, baru mampu mengerjakan lahan usaha tani 1,21 ha. Belum tergarap seluruh tanah yang telah mereka terima ( 2 Ha ), karena masih lemahnya modal kerja dan tidak mampu mengupah atau menyewa ternak untuk menggarap tanahnya dan rendahnya pengetahuan teknologi pertanian.
2. Umumnya para Transmigrasi menanam tanaman se - musim terdiri dari padi, jagung dan ketela pohon serta kacang-kacangan. Disamping itu mereka menanam tanaman keras seperti kelapa, cengkeh dan rambutan. Sampai dengan tahun 1977 / 1978 Dirjen Transmigrasi telah membagikan kepada Transmigran sebanyak 108.530 batang cengkeh, 212.340 batang kelapa dan 8.625 batang rambutan.

3. Hasil pertanian tanaman semusim yang ditanam musim tanam 1977 tercatat untuk padi gogo 0,6 ton/per ha, jagung 0,7 ton/ha, kacang - kacangan 0,6 ton/per ha, singkong 10 s/d 20 ton/per ha.
  4. Menurut survey palawijo Departemen Perdagangan tahun 1978 produksi dari hasil pertanian yang dipasarkan adalah 70 % untuk gaplek, 90 % untuk kacang-kacangan 30 % untuk jagung dan 35 % untuk padi Gogo.
  5. Gangguan tanaman yang paling dirasakan di daerah pembukaan baru adalah Babi hutan dan Kera yang mengganggu tanaman Padi, Jagung dan Ketela pohon. Hama tersebut sukar diberantas karena ruang geraknya luas.  
Selain itu pada Proyek Transmigrasi lama hama/penyakit tanaman yang sering dijumpai adalah Ulat tanah, Walang sangit. Tikus, bagi tanaman padi, dan penyakit Bulai pada tanaman jagung, serta Bercak daun, Ulat daun dan hama Gepeng yang menyebabkan biji busuk dan buah kosong pada tanaman kacang tanah.
  6. Untuk mengatasi kesulitan para Transmigran daerah proyek Transmigrasi diikutkan pada program Bimas dan Inmas bantuan Transmigran dan sampai dengan tahun 1977/1978 luas areal Bimas dan Inmas Bantuan Transmigrasi ( IBT ) untuk tahun 1974/1975, pola Bimas 1.844,5 ha dan IBT 2.411,75 ha, tahun 1975/1976 untuk Inmas tahun 1977/1978 untuk Inmas 1.110 ha .  
Dalam program IBT tiap KK menerima bantuan pupuk 150 s/d 200 kg/ha dan pestisida 1,5 - 41 kg/ha.
- b. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah dalam usaha memajukan Transmigrasi melalui

kebijaksanaan menarik modal swasta dalam dan luar negeri dengan perluasan industri hasil pertanian , antara lain industri Tapioka yang dapat menampung hasil pertanian Transmigran terutama Singkong dan meningkatkan jalur pemasaran hasil pertanian dengan pembukaan jalan serta jalur informasi pasar.

## PELAKSANAAN TRANSMIGRASI PADA PELITA II

Pada priode Pelita II target penempatan Trans - migrasi sebanyak 6.500 KK dengan realisasi 13.551 - KK atau 62.062 jiwa. Kelebihan target tersebut ka - rena adanya Transmigrasi swakarsa ditempatkan di - Way Abung III dan di Tulang Bawang I.

Penempatan Transmigrasi pada Pelita II seluruhnya ditempatkan di Kabupaten/Daerah Tingkat II Lam - pung Utara.

Untuk lebih jelasnya penempatan pada Pelita II seperti tergambar pada tabel ( 4 ).

Tabel. 4

No	Tahun Penempatan	Lokasi Penempatan	J u m l a h		Ket.
			KK	Jiwa	
1.	1975-1976	Way Abung III	9.051	42.106	Da - ti. II
2.	1976-1979	Tulang Ba - wang I	4.500	19.956	Lam - pung. Utara
J U M L A H			13.551	62.062	

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pada Pelita II kelebihan target penempatan sebanyak 7.051 KK .

Apabila kita lihat perkembangan penempatan Transmigrasi yang dikelola Dirjen Transmigrasi dari Pelita I dan Pelita II selalu terjadi kelebihan target tiap Pelita. Hal ini dimungkinkan karena, keberhasilan para Transmigrasi yang ditempatkan memengaruhi keluarga asal sehingga tidak terben-nya Transmigrasi swakarsa datang ke daerah Lampung, dengan harapan dapat mengikuti jejak para Transmig-  
ran.

Kedatangan mereka terpaksa diurus dan dikelola oleh Dirjen Transmigrasi walaupun fasilitas yang diberikan terhadap mereka lebih kecil apabila diban-  
dingkan terhadap Transmigrasi umum, antara lain la-  
han usaha tani yang diberikan + 1 ha, sedangkan pa-  
ra Transmigrasi umum lahan usaha tani 2 ha s/d 5 ha  
per KK.

## PEMBINAAN TRANSMIGRASI DAN DESA TRANSMIGRASI



Pemerintahan desa didasarkan pada ketentuan SKB Mendagri dan Mennakertrans No. 245/1975/Kep. 2145 / Men/1975 tentang pengembangan desa di Proyek Trans-  
migrasi dan petunjuk pelaksanaannya No. 033/ Kpts /  
Trans/III/1975/140/3547/PUOD.

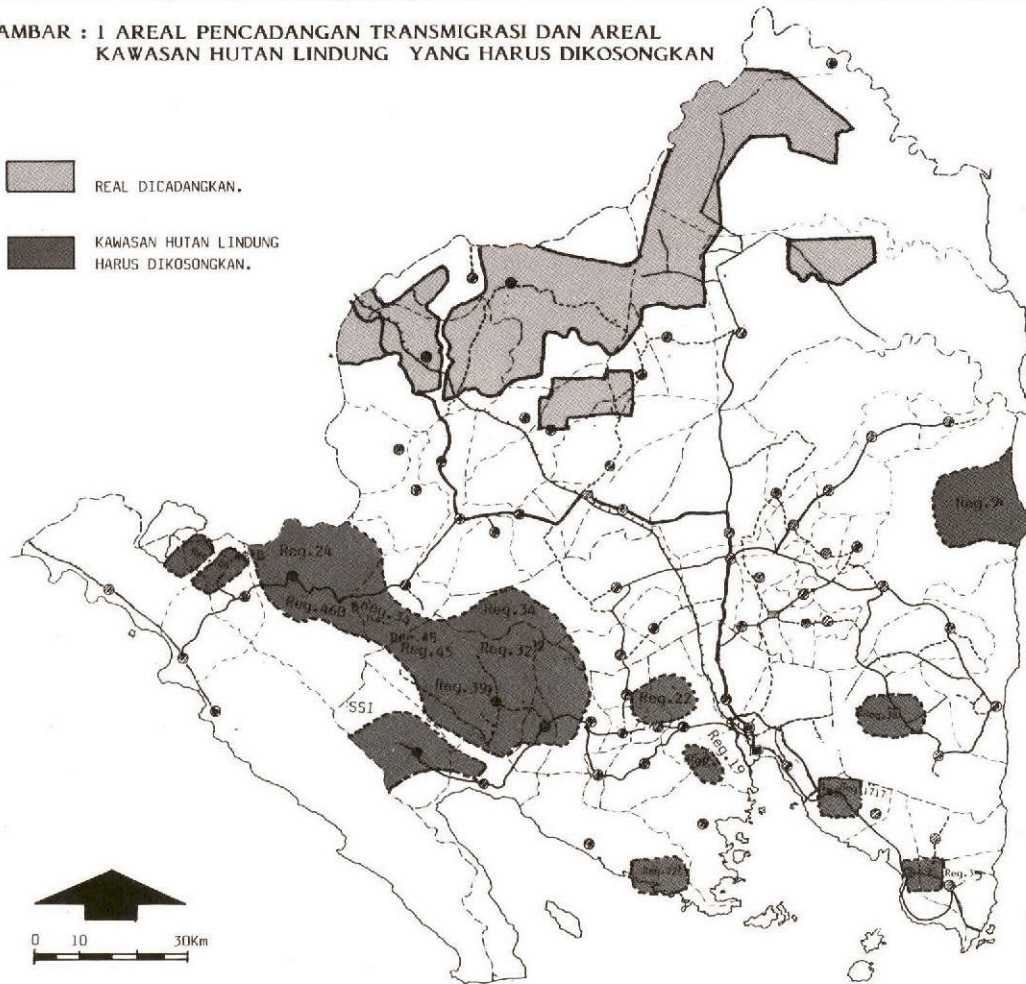
Pada tahapan konsolidasi tahun ketiga dan keempat dibentuk kelembagaan desa dan tahap kelima me-  
kanisme kelembagaan desa telah berjalan lancar se-  
suai dengan fungsinya sehingga terwujud suatu masya-  
rakat pedesaan baru yang bersatu, stabil dan berpar-  
tisipasi dalam pembangunan desa.

Dalam tahapan konsolidasi dilaksanakan pemba-  
ngunan prasarana fisik desa seperti pelayanan kese-  
hatan/KB, pendidikan, keagamaan, lembaga desa, pasar  
dan prasarana jalan.







**GAMBAR : 1 AREAL PENCADANGAN TRANSMIGRASI DAN AREAL KAWASAN HUTAN LINDUNG YANG HARUS DIKOSONGKAN**

-  REAL DICADANGKAN.
-  KAWASAN HUTAN LINDUNG HARUS DIKOSONGKAN.



**LEGENDA**

-  IBUKOTA PROPINSI
-  IBUKOTA KABUPATEN
-  IBUKOTA KECAMATAN
-  BATAS PROPINSI
-  BATAS KABUPATEN
-  BATAS KECAMATAN
-  JALAN NEGARA
-  JALAN PROPINSI
-  JALAN KABUPATEN

**BAPPEDA TKI  
LAMPUNG**

Pembinaan desa Transmigrasi adalah pembangunan pedesaan dan masyarakat pedesaan dalam mencapai taraf hidup Transmigran yang menuju terbentuknya tingkat desa swakarsa dan swasembada.

Pembinaan pembangunan pertanian terutama penyediaan lahan usaha tani yang telah diberikan pada para Transmigran dapat dimanfaatkan sehingga diharapkan produksi pertanian dapat membiayai hidup keluarganya setelah bantuan jaminan hidup berakhir. Untuk itu dilakukan kursus percobaan pola usaha tani yang intensif disamping bantuan bibit pertanian dan perbaikan lahan usaha tani.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pengembangan industri pertanian atau perkebunan pada wilayah Transmigrasi harus bertujuan ganda, disamping untuk peningkatan produksi industri pertanian/perkebunan, juga harus mampu meningkatkan pendapatan petani Transmigran tanpa harus mengakibatkan lahan usaha tani keluarga menjadi kurang produktif atau terlantar sama sekali.

Dalam rangka usaha mencerdaskan para Transmigran pada lokasi Transmigrasi dibangun sekolah-sekolah, baik SD maupun SLTP; walaupun tenaga pengajar, dengan sangat terpaksa diangkat tenaga pengajar yang tidak memiliki ijazah Keguruan. Disamping itu perkembangan kelompok belajar yang mengarah untuk terciptanya kesempatan kerja baru dan meningkatkan pengetahuan.

Sehubungan dengan usaha kelembagaan ekonomi desa dibentuk Koperasi atau KUD persiapan yang bergerak pada penyaluran pupuk dan lain sebagainya.

Berkenan dengan pembinaan keagamaan telah dibangun fasilitas/sarana keagamaan didaerah Transmigrasi berupa Masjid, Gereja dan sarana keagamaan lainnya.

Ini berarti bahwa pembinaan Transmigrasi meliputi berbagai sektor baik sektor ekonomi maupun sosial, dalam rangkaian peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## POLA RESETTLEMENT

Sebagai salah satu akibat mobilitas penduduk yang tinggi ke dan dari daerah Lampung dan sebagai akibat lanjut keberhasilan program Transmigrasi di daerah Lampung yang ditunjang dengan prasarana dan sarana perhubungan yang mudah, murah dan cepat dari Jawa ke Lampung dan sebaliknya, masalah kependudukan di daerah Lampung merupakan masalah yang paling rumit dan hampir tidak berkeputusan.

Program Resettlement penduduk Lampung adalah program penataan ulang penduduk yang bermukim dan berusaha tani di daerah kawasan hutan, daerah kritis, daerah terkena proyek strategis dan daerah yang berpenduduk padat untuk ditempatkan kembali ke daerah diluar kriteria tersebut diatas terutama di wilayah Lampung Utara, yang relatif tipis penduduknya.

Program Resettlement dilakukan dalam bentuk paket pembangunan semacam pola Transmigrasi. Selain untuk menata penduduk program ini terutama bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan di daerah catchment areal yang berfungsi hidrologis.

Berdasarkan konservasi tanah kawasan hutan, sebenarnya areal hutan daerah Lampung tercatat 1.272.144 H yang terdiri dari hutan lindung seluas 314.858 ha, hutan suaka alam 394.630 ha dan hutan produksi termasuk HPH seluas 502.606 ha.

Kondisinya sekarang sangat kritis sebagai akibat terjadinya penyerobotan liar untuk kepentingan produksi, perladangan maupun perkampungan penduduk

yang tercatat 239.761 ha terdiri dari hutan lindung 120.012 ha, suaka alam 20.520 ha dan hutan produksi 99.229 ha.

Para penyerobot liar tersebut terdiri dari sebagian besar penduduk pendatang dari Pulau Jawa, Sumatera Selatan dan disamping itu sebagian kecil dari penduduk daerah Lampung sendiri. (Lihat gambar 1 dan 2).

Kedatangan para Transmigran spontan tidak dengan persiapan dan kurang terkoordinir baik dari daerah penerima maupun daerah pengirim ( Jawa, Bali dan Sumatera Selatan ) tidak menduga arus Transmigrasi spontan akan mengalir deras dari daerah mereka dan kadang-kadang karena akibat rangsangan untuk bertransmigrasi spontan yang relatif murah dan mudah serta dengan harapan keberhasilan yang tinggi.

Akibat daerah penerima belum siap untuk menyediakan suatu areal khusus yang direncanakan bagi kepentingan Transmigrasi spontan berakibat lanjut tidak terkendalinya penduduk pendatang yang pada akhirnya mereka karena tidak mengetahui akan status tanah dan didorong dengan keinginan untuk berusaha tani, mereka kebanyakan berusaha tani dan bermukim pada kawasan hutan. Hal itu menimbulkan kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap berkurangnya debit air untuk irigasi dan pengairan yang telah direncanakan dan dibangun untuk kepentingan pertanian.

Dari data yang tercatat hampir semua register kawasan hutan dijadikan perladangan dan usaha tani oleh penduduk pendatang, sedangkan hutan merupakan sumber daya alam yang mutlak perlu dipertahankan dan diamankan kelestariannya sehingga secara utuh dan kontinu dapat berfungsi sebagai unsur produksi, media pengatur tata air dan perlindungan alam lingkungan.

Resettlement penduduk mulai dilaksanakan dan diawali dengan suatu kegiatan penelitian pada tahun 1978/1979. Seluruh dana berasal dari Pemerintah daerah baik yang berupa bantuan peralatan maupun bahan-bahan.

Hasil penelitian sementara pada waktu itu tercatat penduduk yang bermukim dan berusaha tani pada kawasan hutan, baik hutan lindung/daerah aliran sungai ( catchment areal ) maupun hutan suaka alam sebanyak 43.347 KK atau 24.164 Jiwa. Total 50.784 KK atau 195.067 Jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 5**

REKAPITULASI DAFTAR PENDUDUK UNTUK DI RESETTLE.

NO.	Berasal dari Kawasan/Daerah	Status tanah	Kependudukan dalam KK/Jiwa		
			Yang punya tanah di tempat lain	Yang tidak punya tanah ditempat lain	Jumlah
1.	DAS (Daerah Aliran Sungai)	Hutan lindung			
	1.Das Sekampung Kab. Lamp.Selatan			27.864 107.037	27.864 107.037
	2.Das Seputih Kab. Lamp. Tengah		798 4.698	2.263 9.023	3.061/ 13.721
	3.Das Tulang Bawang kab. Lamp.Utara	Hutan lindung	1.290 5.201	5.584 23.800	6.874/ 29.001
	2. Suaka Alam				
	1.Sumatera Selatan (SSI)	Suaka Marga Satwa idem		2.726 10.305	2.726/ 10.305
	2.Way Kambas			2.822 10.839	2.822/ 10.839
3.	Pendd.Daerah Padat/Spontan	Ex.Kolonisasi		1.620 x)	1.620/ x)
	1.Kab.Lamp.Sel.				
	2.Kab.Lam. Tengah	Ex.Kolonisasi/Transmigrasi lama		5.817 24.164	5.817/ 24.164
Jumlah			2.088 98.99	48.698 185.168	50.784/ 195.067

x) Angka jumlah jiwa belum dihitung.



DARI SEGI TOPOGRAFI WILAYAH TERMASUK CAHTMAN AREA  
WAY ABUNG. KAWASAN HUTAN DI TANJUNGRAJA. KEADAAN  
MULAI RUSAK ( GAMBAR 1 ).



HUTAN LINDUNG REGISTER 6 DI TARAHAN WAY KETIBUNG.  
( GAMBAR 2 ).

Sebenarnya pemindahan penduduk sudah mulai sejak tahun 1971 s/d 1974 melalui Dirjen Transmigrasi dan telah dicoba memindahkan 548 KK penduduk dari Gunung Balak. Namun karena keterbatasan dan kurangnya keterpaduan, pemindahan lanjut tidak dilaksanakan, dan menimbulkan masalah sosial yang berkepanjangan.

Pola Resettlement agak berlainan dengan pola pelaksanaan Transmigrasi umum, dimana Transmigrasi umum, menganut sistim pembukaan daerah baru, dan penduduk yang dipindahkan merupakan penduduk yang membentuk desa - desa baru, sedangkan pola pelaksanaan Resettlement yang dipindahkan ditempatkan pada desa-desa lama dan menjadi penduduk desa tersebut.

Program Resettlement dimaksudkan agar penduduk pendatang dapat membaaur dengan penduduk setempat dan terbukanya desa-desa terisolir yang selama ini relatif belum terjangkau secara optimal dalam rangkaian pembangunan secara utuh.

Tata cara pemindahan dan penempatan dilaksanakan dengan sistim keterpaduan antar Dinas/Instansi yang dikoordinir oleh Gubernur/Kepala Daerah Tk I Lampung.

Daerah pengiriman ditentukan di Kabupaten Lampung Selatan pada Kecamatan Pagelaran, Wonosobo dan Pulau Pangung sedangkan daerah penempatan di Kecamatan Sungkai Selatan dan Blambangan Umpu.

Biaya Resettlement melalui DIP Direktorat Bangdes sebesar Rp. 360 juta dan bantuan Presiden dengan Keputusan Presiden No. 002/Datrans/1980 tanggal 28 April 1980 sebesar Rp. 1.337.580.000,- dan dari APBD Rp. 12.000.000,- .

Dana tersebut digunakan untuk kepentingan penduduk yang dipindahkan :

1. Bantuan pangan terutama beras 30 Kg/per KK selama 6 bulan.

2. Bantuan bahan perumahan terutama seng dan pa-ku.
3. Pengukuran s/d sertifikat tanah.
4. Pembuatan barak - barak penampungan penduduk yang dipindahkan ( Gambar 5 ).
5. Biaya pengangkutan perjalanan dari tempat asal ketempat tujuan Rp. 15.000,-/per KK.
6. Fasilitas perhubungan yaitu pembuatan jalan AWCES 34 Km dan 2 (dua) buah jembatan ( Gambar 6 ).

Penduduk yang dipindahkan mendapatkan lahan usaha tani seluas 2 ( dua ) ha. Pelaksanaan pemindahan Priode Resettlement dilaksanakan mulai tahun 1979/1980 sampai dengan April 1981.

Sesuai dengan SK Gubernur/Kepala Daerah Tk. I Lampung No. 074/DPD/HK/1980 tanggal 26 April 1980 , telah ditetapkan daerah pemindahan dan daerah penempatan penduduk yang dipindahkan. Dengan ketetapan tersebut pada tahun 1979/1980 dilaksanakan program Resettlement dan pemindahan penduduk terrealisir se banyak 5.017 KK ( termasuk sisipan ). Penduduk yang dipindahkan adalah mereka yang bermukim dan berusaha tani dikawasan hutan Reg.22 dan Reg.39 pada :

1. Kecamatan Pagelaran, desa Giri Tunggal dan desa Margosari sebanyak 816 KK atau 3.153 Jiwa.
2. Kecamatan Wonosobo, Atar lebar sebanyak 531 - KK atau 1.944 Jiwa.
3. Kecamatan Pulau Panggung, desa air naningan , Air Bakoman, dataran Lebuai/Talang Beringin sebanyak 3.193 KK atau 10.345 Jiwa.

Penduduk yang dipindahkan dari kawasan hutan





PARA RESETTLE SEDANG MEMBUAT BAHAN-  
PERUMAHAN UNTUK RUMAH MEREKA  
( GAMBAR 3 ).



RUMAH PARA RESETTLE, YANG TELAH DIDIRIKAN DENGAN BAHAN  
SENG DAN PAKU DARI PEMERINTAH ( GAMBAR 4 ).

Reg 22 dan 39 tersebut, dipindahkan pada Kecamatan Sungkai Utara, Selatan dan Blambangan Umpu tertera pada tabel ( 6 ).

Mereka dipindahkan dengan bekal yang ada yaitu kesadaran untuk pindah dan modal yang mereka kumpulkan selama berusaha tani di kawasan hutan. ( lihat gambar 3 dan 4 ).

**Tabel. 6**

I. Kecamatan Sungkai Utara

No.	Nama Desa	Penduduk baru(KK)	Sisipan ( KK )	Jumlah ( KK )
1.	Desa Kotanegara.	539	56	592
2.	Desa Negarabatin	243	25	268
3.	Desa Gedungbatin	90	9	99
4.	Desa Baturaja	270	30	300
5.	Desa Negararatu	270	30	300
J U M L A H		1.409	150	1.559

II. Kecamatan Sungkai Selatan

No.	Nama Desa	Penduduk baru(KK)	Sisipan ( KK )	Jumlah ( KK )
1.	Desa Kotanapal	160	18	178
2.	Desa Tanah Abang	238	26	264
3.	Desa Negara Tulang-Bawang	414	47	461
4.	Desa Sukadana Udik	455	50	505
5.	Sukadana Ilir	196	22	218
6.	Handuyung Ratu	191	21	212
7.	Desa Bandar Agung	319	35	354
8.	Desa Nagri Ujung - karang	851	74	945
J U M L A H		2.824	293	3.117

III. Kecamatan Blambangan Umpu

No.	Nama Desa	Penduduk baru(KK)	Sisipan ( KK )	Jumlah ( KK )
1.	Desa Bandar Dalam	307	34	341
J U M L A H		307	34	341

Total penempatan pada ketiga Kecamatan tersebut sebanyak 4550 KK atau 15442 jiwa ditambah dengan sisipan sebanyak 477 KK sehingga jumlahnya 5017 KK.

Pelaksanaan Resettlement di daerah Lampung telah membuka horizon baru bagi pelaksanaan Transmigrasi, dimana dengan pola Resettlement mengharuskan Dinas/Instansi/Lembaga terkait baik dalam pelaksanaan maupun pembinaan lanjut, dengan kata lain bahwa program Resettlement merupakan keterpaduan program program dalam menata kependudukan di daerah Lampung.

Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembinaan dan pemindahan lanjut, dirumuskan melalui tata kerja Badan Koordinasi Resettlement Penduduk Daerah ( BAKORESDA ) dimana Gubernur/KDH Tk.I Lampung sebagai Ketua BAKORESDA dengan Sekretaris Kepala Direktorat BANGDES dan Dinas/Instansi sebagai anggota.

## **PENYULUHAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT**

### **A. Penyuluhan di daerah pengiriman**

Penyuluhan penduduk yang akan dipindahkan (yang bermukim di kawasan hutan ) dilakukan oleh Dinas / Instansi Tingkat Kabupaten yang terlibat langsung dalam program Resettlement di bawah tanggung jawab Bupati/KDH Tk.II yang bersangkutan.

Perlunya penyuluhan bagi mereka yang akan dipindahkan agar mereka mengerti jelas makna dari hutan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.

Team Penyuluhan terdiri dari Dept. Penerangan Tk.II, Kantor BANGDES Tk. II, KRPH, Camat dan Kepala Desa pada daerah yang di Resettle.



BARAK PENAMPUNGAN RESETTLE SEBELUM MEREKA DITEMPATKAN  
PADA LOKASI PERUMAHAN MEREKA. ( GAMBAR 5 ).



PEMBUATAN JALAN DAN JEMBATAN SEPANJANG 34 Km.  
YANG MENGHUBUNGAN ANTAR DESA RESETTLEMENT.  
( GAMBAR 6 ).

## B. Pembinaan Masyarakat

Pembinaan masyarakat dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas / Instansi yang terkait langsung dengan penanganan proyek Resettlement di daerah penempatan/penerima, dan didaerah asal.

### POLA PENENTUAN DAERAH PENGIRIM DAN PENERIMA

#### 1. Kreteria daerah yang penduduknya akan dimukimkan kembali

- a. Penduduk yang akan dimukimkan kembali berasal dari daerah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara yang bermukim dan berusaha tani didaerah kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai meliputi daerah :
  1. Way Kambas reg.9
  2. Way Waya reg.22
  3. Gn. Tanggamus reg.30
  4. Pegunungan Tarahan reg.31
  5. Bukit Rindingan reg.32
  6. Kota Agung Utara reg.39
  7. Batu Serampok reg.17
  8. Tangkit Tebak reg 34
  9. Way Ketibung reg 35/37
  10. Suaka Margasatwa SS.1
  11. Bukit Punggur reg. 19
  12. Bukit Ringgis reg.44/45
  13. Batu Tegi reg. 39/34
- b. Daerah kritis yaitu daerah yang diduga akan terkena bencana/musibah apabila dimukimkan.
- c. Daerah terkena proyek-proyek startegis yaitu daerah/lokasi proyek yang bernilai strategis yang terpaksa harus memindahkan penduduk sebagai akibat adanya proyek tersebut.

- d. Daerah yang berpenduduk padat yaitu daerah Transmigrasi eks kolonialisasi dengan tanah usaha kurang dari 0,5 Ha dan buruh tani.

## 2. Pola Pendaftaran Penduduk

Bagi daerah asal/Pengiriman yang penduduknya akan dimukimkan harus mempunyai persyaratan sbb :

- a. Penduduk yang telah lama bermukim di desa dalam kawasan hutan atau terdaftar sebagai penduduk desa pedukuhan, minimal selama 5 tahun.
- b. Status, Identitas pendukuhan, tanah garapan dan lama bermukim dan berusaha tani dibuktikan dengan keterangan Kepala Desa, Camat, Koramil/Dan Sektor dan KPPH ( Kehutanan setempat)
- c. Pengisian formulir pendaftaran.
- d. Bagi Daerah Padat penduduk yang benar-benar tidak memiliki tanah dan atau penduduk yang mempunyai tanah kurang dari 0,5 Ha dan terdaftar.

## 3. Pengamanan pada lokasi/daerah ditinggalkan

Dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup lokasi-lokasi yang ditinggalkan/dikosongkan segera diamankan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dilarang bagi penduduk lama untuk bermukim dan berusaha tani di daerah tersebut.
- b. Lokasi-lokasi tersebut segera dihutankan kembali oleh Dinas Kehutanan.
- c. Sejak saat ini sudah diadakan rekontruksi tata batas hutan yang boleh dihuni oleh penduduk.

d. Adapun pengamanan batas hutan tersebut di -  
laksanakan oleh team teknis gabungan antara  
Dinas dan Tingkat Kecamatan antara lain :

- Camat Kepala Wilayah
- Dan Sektor Kepolisian
- Dan Ramil
- K R P H.

( Akan ditentukan dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Lampung ).

Dengan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, ke-  
bun dilokasi yang ditinggalkan/dikosongkan, dihu -  
tankan kembali, masih dapat dipungut hasilnya sela  
ma 2 tahun dengan syarat :

- Tidak diperbolehkan meremajakan tanaman.
- Tidak boleh melakukan pemeliharaan tanaman yang  
ditinggalkan,
- Pada waktu memetik hasil hutan tersebut harus me  
lapor kepada pihak Pamong Desa terdekat, baik pa  
da waktu datang demikian pula waktu kembali.

Mengingat Proyek Resettlement ini adalah yang  
pertama dan baru di Indonesia, dimana penyelengga-  
raan proyek didaerah pengirim maupun didaerah pene  
rima/penempatan dilaksanakan dalam suatu program  
secara serentak. Jelas hal ini berbeda dengan pe -  
nyelenggaraan Transmigrasi umum yang biasa, jelas  
harus ditangani secara khusus dan serius

#### 4. Tahap Prioritas.

Rencana Pelaksanaan pemukiman kembali penduduk  
( Transmigrasi lokal ) di daerah Tk. I Lampung  
pada Pelita III.

- (1). 1980/1981 :
1. Kec. Pulau Pangung dan Kec. Wonosobo register 32/39 = 4.500 KK
  2. Kec. Pagelaran reg. 22 = 517 KK
- Jumlah = 5.017 KK
- (2). 1981/1982 :
1. Kec Wonosobo reg. 39 = 5.677 KK
  2. Kec. Tanjungraja reg 24 = 1.690 KK
  3. Kec Sumber Jaya reg = 1.719 KK  
44/45.
  4. Kec Bk. Kemuning reg 34 = 914 KK
- Jumlah = 10.000 KK
- (3). 1982/1983 : Sampai dengan Maret 1983 = 17.500 KK
1. Kec. Pulau Pangung  
reg 22. = 1.040 KK
  2. Kec. Pagelaran reg 22 = 3.678 KK
  3. Kec. Kedondong reg 21 = 1.297 KK
  4. Kec. Cukuh Balak  
reg. 21 = 4.075 KK
  5. Kec. Gedingtataan  
reg. 21 = 1.410 KK
  6. Kec. Padang Cermin  
reg. 19 = 1.410 KK
  7. Kec. Kalianda reg. 32 = 1.807 KK
  8. Kec. T. Betung/Panjang  
reg. 17 = 1.635 KK
  9. Kec. Lb. Maringgai = 655 KK  
reg. 9/15
- Jumlah = 17.500 KK



(4). 1983/1984 : sebesar 17.500 KK

1. Kec. Kalirejo )	
2. Kec. Padang Ratu )	= 5.273 KK
3. Kec. Labuhan Maringgai )	
4. Kec. Sukoharjo )	
5. Kec. Banjit reg 24	= 231 KK
6. Kec. Belalau reg 46	= 1.261 KK
7. Kec. Bali bukit reg 47/48	= 1.123 KK
8. Kec. Kasui reg 24	= 1.074 KK
9. Kec. Pss.tengah/Krui Register 49 b.	= 130 KK
10. Kec.Pss.Selatan reg 47 b	= 175 KK
11. Kec.Abung Barat reg 34	= 575 KK
12. Kec.Gn.Balak reg 38	= 5.648 KK
13. Kec.Batu Tegi	= 2.010 KK
	<hr/>
Jumlah	= 17.500 KK

#### 5. Kreteria Daerah Penerima.

1. Daerah penerima penduduk yang akan dimukimkan, didaerah yang dicantumkan pada SK.Gubernur KDH Tk. I Lampung No.G/086/Bappeda/HK/1981, meli - puti areal seluas 180.000 Ha.
2. Disamping itu terdapat areal potensi diluar ka wasan hutan yang mampu menampung tambahan Transmigrasi/Transmigrasi lokal seluas 36.500 Ha terdiri dari :
  1. Sungkai Utara dan Selatan 10.000 Ha.
  2. Sisa Tulang Bawang I & II 9.500 Ha.
  3. Ex. areal HGU Jepang di - luar kawasan hutan. 17.500 Ha.
3. Kaitan dengan pusat pengembangan wilayah Dae - rah Lampung telah menetapkan pusat pengemba - ngan diwilayah Kabupaten Lampung Utara yaitu:
  1. Menggala
  2. Krui/Liwa
  3. Pakuon Ratu/Blambangan Umpu.

## POLA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI LOKAL

Pertambahan penduduk akibat imigrasi dalam Pelita II 2,88 % pertahun dan dalam Pelita III 3,43 % pertahun. Para pendatang tersebut ( Transmigrasi spontan ) pada umumnya adalah petani miskin yang sebagian besar tidak memiliki tanah tempat asalnya, di samping itu tingkat pendidikannya sangat rendah dan sebagian besar dari mereka sukar untuk berbahasa Indonesia.

Sebagian dari mereka ada yang datang dengan di koordinir dengan baik dan sebagian lain datang secara spontan atas ajakan keluarga mereka, tetangga atau kawan-kawan mereka, dan mereka ini lalu membuka areal kawasan hutan Lampung secara liar sejak Thn 1960 sampai sekarang, karena mereka kurang mengetahui tentang status tanah.

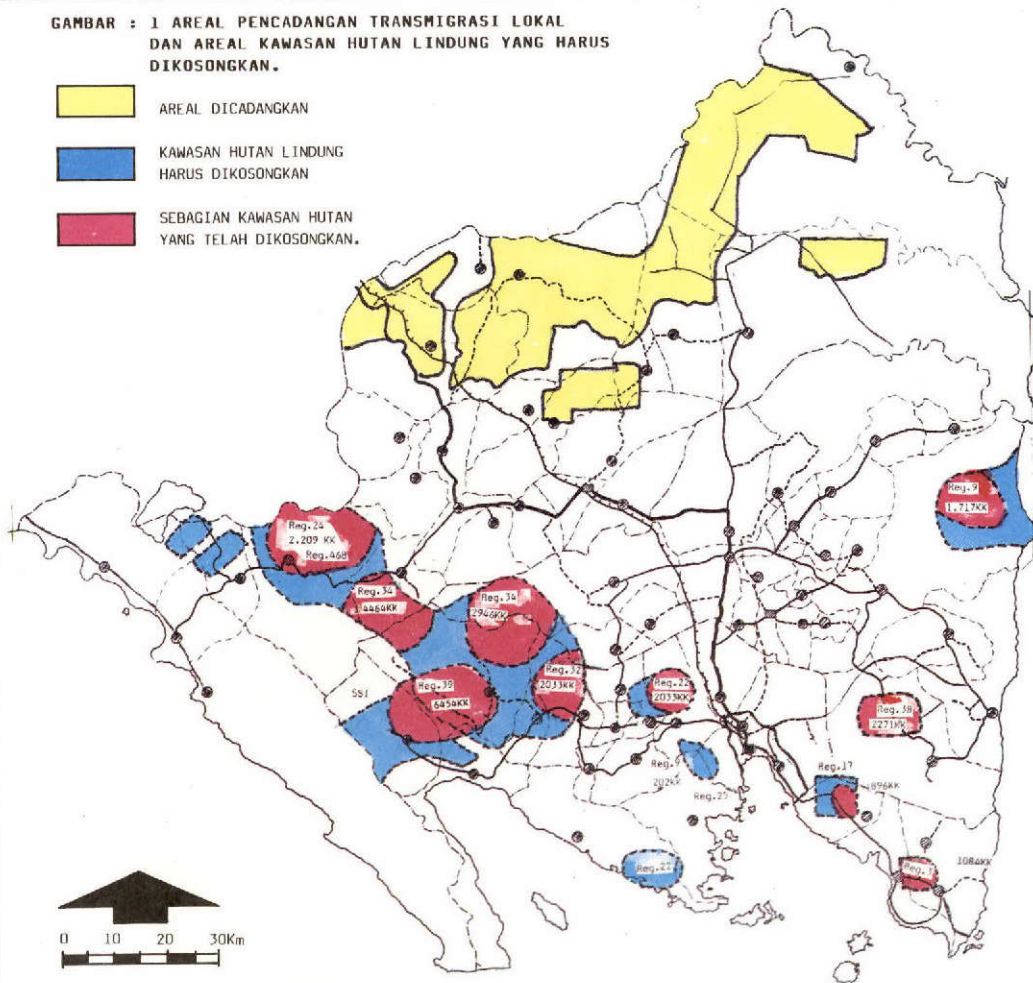
Masalahnya menjadi gawat karena hutan yang dibuka adalah hutan yang berfungsi Hidroorologis (DAS) dan hutan suaka margasatwa yang memiliki fauna yang dilindungi, akibat lanjut makin kecilnya debit air proyek irigasi terutama Way Sekampung dan Way Seputih, Way Pengubuan dan lain-lainnya.

Pertambahan penduduk yang tinggi dapat membawa pengaruh positif yaitu bertambahnya tenaga kerja (kurang trampil) dan bergerak sebagian besar pada sektor primer yang mendorong memperluas areal pertanian dan meningkatkan produksi pertanian dan juga dapat membawa akibat negatif yaitu penambahan beban daerah dalam menyediakan fasilitas sosial, padahal pemerintah belum siap untuk hal itu karena terbatasnya dana dan penyediaan lapangan kerja diluar pertanian yang sangat terbatas dan menyebabkan timbulnya masalah sosial lainnya seperti pengangguran ( tidak kentara ).

Kadaan tersebut untuk daerah Lampung, mungkin

**GAMBAR : 1 AREAL PENCADANGAN TRANSMIGRASI LOKAL  
DAN AREAL KAWASAN HUTAN LINDUNG YANG HARUS  
DIKOSONGKAN.**

- AREAL DICADANGKAN
- KAWASAN HUTAN LINDUNG HARUS DIKOSONGKAN
- SEBAGIAN KAWASAN HUTAN YANG TELAH DIKOSONGKAN.



**LEGENDA :**

- IBUKOTA PROPINSI
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN
- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- JALAN NEGARA
- JALAN PROPINSI
- JALAN KABUPATEN

**BAPPEDA TKI  
LAMPUNG**

karena letak geografis yang menguntungkan, murah dan lancarnya perhubungan dan keberhasilan Transmigrasi merupakan daya tarik utama bagi para pendatang untuk datang, berusaha, bermukim dan menetap di daerah Lampung.

Sebagai akibat lanjut dari tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, sukar teratasi dan dikendalikan dan akhirnya penduduk pendatang karena terdorong keinginan untuk berusaha tani, disatu pihak keterbatasan areal garapan di beberapa daerah terjadilah salah satu posisi dalam memanfaatkan tanah garapan, dimana mereka memasuki daerah kawasan hutan untuk dijadikan lahan usaha tani.

Dengan latar belakang tersebut diatas ditetapkan kebijaksanaan daerah untuk mengatur dan menata penduduk pada kawasan hutan yang kemudian untuk dipindahkan melalui program Resettlement .

Karena dengan Norma Resettlement terlihat perkembangan sosial ekonomi dan kebudayaan akan terlambat, sebab mereka harus berswadaya membuat fasilitas umum dan memakan waktu yang cukup lama mengingat kemampuan para pemukim sangat terbatas, akibat yang diterimakan relatif kecil sehingga mereka:

1. Dikhawatirkan para Resettle kembali ketempat asal karena jarak yang relatif dekat, akibat dari jaminan hidup yang belum mencukupi (selama 6 bulan a, 30 kg/KK) sejak pengolahan tanah sampai musim panen.
2. Dikhawatirkan mereka tidak kerasan akibat fasilitas terbatas dan harus berswadaya sedangkan modal mereka sudah habis.
3. Dikhawatirkan mereka mencari nafkah tambahan diluar proyek, yang mengakibatkan memperlambat proses pembukaan tanah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta mengingat mereka yang dipindahkan pada umumnya kehidupan mereka sudah lebih baik dari Transmigrasi umum maka untuk tahun 1981/1982 s/d 1983/1984 ditetapkan pemindahan penduduk dengan Norma Transmigrasi umum, dan dikelola melalui pola Satbintrans.

Susunan organisasi Satuan Pembina menyelenggarakan Transmigrasi Tingkat I ( Satbintrans I ) yaitu Gubernur/KDH Tingkat I selaku Ketua Satbintrans I / penanggungjawab dan Kanwil Transmigrasi selaku Sekretaris Satbintrans I, dengan Dinas/Instansi Tk. I sebagai anggota.

Di daerah Tk. II sebagai koordinator/penanggung jawab adalah Bupati /Walikota KDH Tingkat II dan Kepala Kantor Dirjen Transmigrasi Tk. II selaku sekretaris, sedangkan Dinas/Instansi/Lembaga Tk. II sebagai anggota.

Koordinator lapangan di daerah penerima dan pengirim adalah Camat/Kepala wilayah setempat dan petugas dinas/instansi tingkat kecamatan dan Kepala Desa setempat sebagai anggota.

Dengan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dimaksudkan agar program Translok benar-benar dapat mencapai sasaran optimal dalam kaitan dengan pembangunan daerah Lampung terutama terhadap pemerataan penyebaran penduduk di daerah dengan penataan kembali penduduk di daerah Lampung yang tersebar tidak merata, terutama penduduk yang berada di daerah kawasan hutan, dan untuk mencegah terjadinya kematian penduduk yang terlalu tinggi dan jarang disuatu tempat.

Selain itu diarahkan pada pengembangan wilayah dalam hubungannya dengan pembukaan daerah terisolir yang selama ini belum terjangkau oleh

kegiatan dan fasilitas pembangunan secara optimal. Untuk memperlancar hubungan daerah Translok dengan daerah pengembangan sekitar, telah dibangun sarana perhubungan antar Kecamatan dan dari pusat pengembangan ke daerah Translok, termasuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Menggala, Tulang Bawang dan Mesuji, ( gambar 7 & 8 ) yang selama ini dihubungkan dengan ferry Transmigrasi.

Dengan Pembangunan jembatan penghubung diharapkan lancarnya lalu lintas, untuk angkutan hasil produksi pertanian di daerah Translok dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat Transmigrasi.

#### **I. Rencana Daerah Asal Pemindahan dan Penempatan**

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur / KDH Tingkat I Lampung dengan SK. Gubernur/KDH Tk.I Lampung Nomor 074/DPD/HK/1980 Tgl. 26 April 1980, untuk memindahkan 50.000 KK selama Pelita III, terutama yang berada pada daerah-daerah kawasan hutan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Utara yaitu :

1. Way Kambas Reg. No. 9
2. Way Waya Reg. No. 22
3. Tenggamus Reg No. 30
4. Bukit Rindingan Reg. No. 32
5. Titi Bungur II Reg. No.18/43
6. Pegunungan Araka Reg. No. 31
7. Kota Agung Utara Reg. No.39
8. Way Kibung Reg. No. 37
9. Batu Serampok Reg. No.17/19
10. Tangkit Tebak Reg. No. 34
11. Way Katibung Reg. No. 35/37.

Sedangkan daerah yang direncanakan bagi penempatan penduduk di Lampung Utara, pada Kecamatan

Mesuji, Pakuon Ratu, Menggala, Blambangan Umpu dan Bahuga di cadangkan tanah dengan Keputusan Gub/KDH Tingkat I Lampung tanggal 4 Mei 1981 No.G/086/BAP-PEDA/HK/1981, seluas 180.000 ha masing-masing pada kecamatan :

1. Kec. Blambangan Umpu	luas +	15.000 ha
2. Kec. Bahuga	luas +	15.000 ha
3. Kec. Pakuan Ratu	luas +	65.000 ha
4. Kec. Tl.Bawang tengah	luas +	25.000 ha
5. Kec. Tl.Bawang Ilir	luas +	20.000 ha
6. Kec. Mesuji	luas +	40.000 ha

## 2. Rencana Kegiatan

Untuk tahun 1981/1982 s/d 1983/1984 telah ditepatkan rencana penempatan sebagai berikut :

1. Penduduk Eks Lampung Utara ditempatkan di daerah Mesuji dan Tulang Bawang.  
Penduduk Eks Lampung Utara berasal dari Kecamatan Tanjung Raja, Sumber Jaya, Bukit Kemuning, Banjit, Belalau, Kasui Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Abung Barat.
2. Penduduk Eks Lampung Selatan ditempatkan di daerah Blambangan Umpu dan Pakuon Ratu, Tulang Bawang.  
Penduduk Eks Lampung Selatan berasal dari Wonosobo, Pagelaran, Cukuh Balak, Padang Cermin, Kalianda, Telukbetung/Panjang dan Talang Padang.
3. Penduduk Eks Lampung Tengah ditempatkan di daerah Pakuon Ratu.  
Penduduk Eks Lampung Tengah berasal dari Kalirejo, Padang Ratu, Gunung Balak dan Labuhan Maringgai.

Secara lengkap lokasi dan jumlah penempatan tertera pada tabel ( 7 )



KAPAL FERRY TRANSMIGRASI MENGGALA-CEKAT NENYIK YANG BERFUNGSI  
MENGHUBUNGAN MENGGALA DAN TRANSMIGRASI LOKAL  
( GAMBAR 7 ).



PEMBANGUNAN JEMBATAN WAY TENUMBANG (TULANG BAWANG) DAN  
APABILA SELESAI AKAN MEMPERMUDAH HUBUNGAN MENGGALA DAN  
DAN DAERAH TRANSLOK YANG BERARTI TERBUKANYA  
DAERAH TERISOLIR. ( GAMBAR 8 ).



**Tabel. 7**

Target Penempatan Translok Tahun 1981/1982 &amp; 1982/1983

No.	S K P	Target 1981/1982 (KK)	Target 1982/1983 (KK)	Total
1.	Mesuji A	800	1.100	1.900
2.	Mesuji B	800	1.100	1.900
3.	Mesuji D	500	1.100	1.600
4.	Mesuji E	700	1.100	1.800
5.	Menggala B	700	-	700
6.	Menggala C	700	1.300	2.000
7.	Pakuan Ratu A	400	-	400
8.	Pakuan Ratu B	750	1.250	2.000
9.	Pakuan Ratu C	750	600	1.350
10.	Pakuan Ratu D	500	-	500
11.	Negara Ratu A	200	400	600
12.	Negara Ratu B	500	-	500
13.	Blambangan Umpu A	500	500	1.000
14.	Blambangan Umpu B	600	1.100	1.700
15.	Blambangan Umpu C	600	1.100	1.700
16.	Gedong Aji II/A	-	2.650	2.650
17.	Gedong Aji II/B	-	1.700	1.700
18.		-	2.500	2.500
T O T A L		9.000	17.500	26.500

**3. Pola Pengembangan Wilayah**

Daerah yang telah atau akan dikosongkan di -  
amankan melalui :

1. Larangan penduduk baru untuk menduduki daerah tersebut dan berusaha tani.
2. Dengan melaksanakan Reboisasi, oleh Dinas Kehutanan.

3. Dengan Rekonstruksi Tata Batas Hutan, oleh Kehutanan.
4. Pengamanan dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh :
  - a. Camat
  - b. Dan Sek Polri
  - c. Dan Ramil
  - d. KKPH
  - e. Kepala Desa.

Daerah yang ditinggalkan oleh penduduk yang di Transmigrasi lokalkan tersebut, harus di tinggalkan secara bedol desa.

Daerah Tulang Bawang dan Mesuji yang merupakan daerah Hinterland dari pusat pengembangan Menggala yang secara potensial dapat dikembangkan sebagai daerah pengembangan dan merupakan pengembangan bagian Utara/Timur dalam rangka memanfaatkan potensi daerah bagi pengembangan daerah untuk kegiatan penunjang pusat pengembangan Menggala, pada daerah pemukiman baru, akan ditentukan sub-sub pusat pengembangan. Sedangkan daerah pemukiman Sungkai Utara dan Sungkai Selatan untuk menunjang pusat pengembangan Blambangan Umpu/Pakuon Ratu.

Dengan demikian pusat-pusat pengembangan Kabupaten Lampung Utara dapat ditunjang dengan pemukiman kembali penduduk yang merupakan daerah Hinterland.

Untuk selanjutnya dalam tata ruang pengembangan seperti Ketapang dan Negara Ratu yang dapat membantu pengembangan dan daerah hinterland.

#### 4. Perencanaan Pelaksanaan Translok

##### a. Perencanaan Pemukiman :

1. Perencanaan menyeluruh (sub Regional Planning) dilakukan oleh Bappeda Tingkat I Lampung dengan memperhitungkan seluruh aspek.
2. Pengukuran/Pemetaan dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Lampung.
3. Fasilitas fisik pembuatan jalan, jembatan dan landclearing dilaksanakan oleh D P U Tingkat I Lampung.
4. Pembangunan rumah Translok, fasilitas umum dan jaminan hidup dilaksanakan oleh Dirjen Transmigrasi.
5. Fasilitas ekonomi dan sosial dibangun secara sektoral berdasarkan sumber dana yang telah tersedia untuk: Pembuatan rumah ibadah, pendirian Sekolah Dasar/SLTP, Balai Pengobatan, Pasar dan bantuan untuk KUD / Koperasi.

##### b. Pola Pemukiman :

Pola Pemukiman dengan menggunakan pola tata kota dan daerah yang menganut sistim WPP, S K P dan SP.

1. Wilayah Pengembangan Pemukiman ( WPP ) terdiri dari : WPP Blambangan Umpu, WPP Mesuji, WPP Menggala dan WPP Pakuon Ratu.
2. Wilayah Pengembangan Pemukiman (WPP) terdiri dari 5 Satuan Kawasan Pemukiman (SKP).
3. Satuan Kawasan Pemukiman terdiri dari 5 Satuan Pemukiman ( SP ).

4. Dari 5 Satuan Pemukim (SP) terdapat 1 (satu) Satuan Pemukim Utama (SPU) yang merupakan Pusat Satuan Pemukim lainnya. Pada SP Utama dibangun fasilitas umum, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya, sehingga berkembang menjadi sentral kegiatan dari SP lainnya.

## 5. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Translok 1981 / 1982 - 1982 / 1983.

### 1. Realisasi Pemindahan.

Pelaksanaan pemindahan dan penempatan calon Translok telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 1981, sampai akhir Maret 1983 telah di - realisir pemindahan penduduk sejumlah 26.001 KK. Penduduk yang dipindahkan adalah mereka dari kawasan hutan Reg. 17/19, 39/31;9 sebagai berikut:

- Kotamadya Reg. 17/19	-	892	KK
- Lampung Selatan Reg.39/31 dan Reg 32/34	-	10.799	KK
- Lampung Tengah Reg 39 dan Reg 32/34		6.417	KK
- Lampung Utara Reg 34/24 dan Reg 46 B, 32	-	490	KK
		<hr/>	
Jumlah	-	26.001	KK

### 2. Realisasi Penempatan.

Tepat tanggal 1 Agustus 1981, mereka dibebaskan dari Wonosobo dan Tanjung Raja ditem - patkan pada lokasi Mesuji. Sejak Tgl 1 Agustus 1981 sampai dengan tgl 30 Maret 1983 telah dite - tapkan sejumlah 26.001 KK atau 107.481 jiwa.

Untuk Jelasnya Realisasi penempatan adalah Sbb : ( tabel 8 ).



GUBERNUR/KDH TK. I LAMPUNG SEDANG BER-  
WAWANCARA DENGAN PESERTA TRANSLOK  
YANG AKAN DIBERANGKATKAN 1 AGUSTUS 1981  
DARI KECAMATAN WONOSOBO. ( GAMBAR 9 ).



PESERTA TRANSLOK YANG AKAN BERANGKAT 1 AGUSTUS 1981  
DARI KECAMATAN WONOSOBO. ( GAMBAR 10 ).

**Tabel. 8**

Penempatan Translok s/d 30 Maret 1983

No.	SKP/UPT	SP	Persiapan Rumah	Realisasi Penempatan	
				KK	Jiwa
1.	Mesuji A	4	1.900	1.850	7.721
2.	Mesuji B	4	1.900	1.870	7.317
3.	Mesuji D	3	1.700	1.670	6.564
4.	Mesuji E	5	2.700	2.637	10.689
5.	Menggala B	4	2.000	1.959	8.424
6.	Menggala C	6	3.150	2.995	12.477
7.	Blambangan Umpu A	3	1.050	1.032	4.036
8.	Blambangan Umpu B	4	1.106	1.075	4.553
9.	Blambangan Umpu C	4	1.350	1.329	5.133
10.	Pakuan Ratu A	3	700	695	2.985
11.	Pakuan Ratu B	4	1.500	1.478	6.165
12.	Pakuan Ratu C	2	959	911	4.054
13.	Pakuan Ratu D	1	514	504	2.091
14.	Negara Ratu A	2	700	679	2.884
15.	Negara Ratu B	3	1.100	1.080	4.552
16.	Gedong Aji A.1	2	900	883	3.786
17.	Gedong Aji A.2	2	900	880	3.812
18.	Gedong Aji B.1	2	850	833	3.598
19.	Gedong Aji B.2	2	900	878	3.610
20.	Gedong Aji B.3	2	800	736	3.002
J u m l a h		62	26.648	26.001	107.481

**3. Fasilitas Perumahan dan Air bersih.**

Pembangunan Perumahan dan Sumur (dalam rangka penyediaan air bersih) yang masing-masing di - targetkan 26.500 buah rumah dan 3.325 buah sumur

telah mencapai taraf penyelesaian 99.98% dan 100%. Untuk target 1981.1982 pada dasarnya telah terselesaikan (99.000 bh) yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan target 1982/1983 (17.500 bh) secara terperinci tertera pada tabel ( 9 ).

Tabel. 9

JUMLAH PENYELESAIAN FASILITAS PERUMAHAN DAN AIR BERSIH  
1981/1982-1982/1983 (Situasi Maret 1983)

L O K A S I	Pembangunan Rumah		Pembangunan Air bersih	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Mesuji A	1.900	1.900	238	238
Mesuji B	1.900	1.900	237	237
Mesuji D	1.600	1.700	199	199
Mesuji E	2.500	2.700	233	333
Menggala B	1.400	2.000	268	268
Menggala C	2.000	2.900	344	344
Pakuan Ratu A	800	698	88	88
Pakuan Ratu B	2.000	1.560	204	204
Pakuan Ratu C	1.350	878	164	164
Pakuan Ratu D	800	700	57	57
Negara Ratu A	600	700	100	100
Negara Ratu B	900	1.100	131	131
Blambangan Umpu A	900	1.050	132	132
Blambangan Umpu B	1.700	1.049	120	120
Blambangan Umpu C	1.700	1.350	149	149
Gedong Aji A.1	900	900	111	111
Gedong Aji A.2	900	860	111	111
Gedong Aji B.1	850	850	110	110
Gedong Aji B.2	900	900	111	111
Gedong Aji B.3	800	800	98	98
T O T A L	26.500	26.495	3.325	3.325



PERUMAHAN TRANSLOK YANG SEDANG DAN SUDAH DIBANGUN  
UNTUK DITEMPATI. ( GAMBAR 11 ).



MENTERI DALAM NEGERI, SUPARJO RUSTAM, SEDANG  
BERWAWANCARA DENGAN PESERTA TRANSLOK YANG DITEMPATKAN  
DI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU. ( GAMBAR 12 ).



#### 4. Fasilitas Umum.

Berbagai fasilitas umum direncanakan pembangunannya pada daerah Transmigrasi lokal tersebut guna melengkapi prasarana kehidupan dan infrastruktur yang telah dibangun.

Fasilitas sosial dimaksud seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, pasar, lembaga desa, koperasi, gudang, dan sebagainya.

Sampai dengan situasi akhir Maret 1983 terlihat fasilitas umum yang telah terpenuhi seperti pada tabel ( 10 )

**Tabel. 10 : CATATAN PEMENUHAN FASILITAS UMUM DI DAERAH TRANSLOK ( akhir Maret 1983)**

Fasilitas	Sudah/belum dipenuhi/ada	Jumlah Unit	Keterangan
Balai Desa	Belum	-	
Poliklinik	Sudah	54	
Gudang	Sudah	88	
Masjid	Sudah	38	
L K M D	Belum	-	
Koperasi	Belum	-	
Sekolah SD	Sudah	15	
Sekolah SMP	Sudah	1	
P a s a r	Sudah	1	

#### 5. Pembukaan Lahan.

Pembukaan lahan pemukiman Translok sampai situasi Maret 1983, sudah dilakukan berupa kegiatan-kegiatan Land Clearing, Pembuatan jalan

penghubung, jalan poros dan jalan desa. Target dan Realisasi pembangunan terlihat pada tabel ( 11 ).

**Tabel. 11**

REALISASI PEMBANGUNAN KEGIATAN PEMBUKAAN LAHAN  
PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 1981/1982 - 1982/1983  
( Situasi 30 Maret 1983 )

L O K A S I	Land Clearing		Jalan Penghubung		Jalan Poros		Jalan Desa	
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	target (Km)	Realisasi (Km)	target (Km)	Realisasi (Km)	target (Km)	Realisasi (Km)
Mesuji A	2.850	2.850	20,5	20,5	33	33	67,5	54
Mesuji B	2.850	2.850	6	6	39	39	79	59
Mesuji D	2.475	2.475	25	25	39,2	39,2	73	73
Mesuji E	2.775	2.775	25	25	31,9	31,9	70	70
Menggala B	3.225	3.225	20	20	36	25,5	62	68,5
Menggala C	3.750	3.750	15	12,5	37,5	40	76	103,62
Pakuan Ratu A	1.050	863	15,5	15	21	17	27	19,5
Pakuan Ratu B	2.400	1.746,8	20	13,7	30	12	57	21
Pakuan Ratu D	1.850	1.778	30	20	21	12,5	42	36,75
Pakuan Ratu C	1.850	1.448	17	14,9	21	8	41	35,5
Negara Ratu A	1.050	1.096,87	13	10	18,5	1,5	36	5
Negara Ratu B	1.725	2.027	22,5	12	23	8	44	34,5
Elambangan Unpu A	1.850	1.802	7	7	11	2,5	38	29
Elambangan Unpu B	2.025	1.854,5	2	2	31	14,5	56	30
Elambangan Unpu C	2.025	2.025	9	9	35	28	57	34
Gedong Aji A1	1.350	1.336	-	-	15,75	15,6	31,5	31
Gedong Aji A2	1.350	1.296	-	-	15,75	9,5	31,5	28
Gedong Aji B1	1.275	1.275	-	-	15	7	29,75	27
Gedong Aji E2	1.350	1.270	-	-	15,45	8	31,5	29
Gedong Aji B3	1.200	1.200	21	20,6	15	1,5	28	27
T O T A L	39.675	38.833,17	268,5	233,20	600,05	354,2	977,75	713,11

## 6. Perkembangan Pembibitan Cengkeh dan Kelapa Hyberida.

Target pembibitan cengkeh 779.200 butir dan pembibitan Kelapa Hiberida sebanyak 196.500 butir. Sampai dengan situasi akhir Maret dan target tersebut diatas yang baru dilaksanakan pembibitan cengkeh yaitu sejumlah 631.830 batang , sedangkan untuk kelapa hiberida belum dilaksana - nakan karena masih dalam taraf penyediaan lahan dan akan direncanakan sekitar bulan-bulan Mei dan Juni 1983. Perbandingan target dan Realisasi pada situasi 30 Maret 1983 terlihat pada tabel ( 12 ).

**Tabel. 12 :** TARGET DAN PERKEMBANGAN PEMBIBITAN CENGKEH DAN KELAPA HIBRIDA DAERAH TRANSLOK PADA SITUASI 30 MARET 1983

LOKASI PEMBIBITAN	LOKASI DISTRIBUSI	Target KK	Pembibitan Cengkeh			Pembibitan Kelapa Hibrida		
			Target Bibit		Perkembangan 30 Maret 1983	Target Bibit		Perkembangan 30 Maret 1983
			Pembibitan (butir)	Siap Salur (butir)		Pembibitan (butir)	Siap Salur (butir)	
Elambangan Umpu B	Elambangan Umpu A, B dan C	5.400	153.000	197.800	121.586	38.600	27.020	-
Mesuji A	Mesuji A, B	3.800	107.000	64.200	95.189	27.050	18.935	-
Pakuan Ratu C	Pakuan Ratu D, C Negara Ratu B	3.050	87.000	52.200	70.712	21.800	15.260	-
Pakuan Ratu B	Negara Ratu A Pakuan Ratu B	2.100	60.000	36.000	49.323	21.800	15.260	-
Mesuji E	Mesuji E, D	4.300	121.000	72.600	90.090	30.750	21.525	-
Menggala C	Menggala C, B	3.900	110.000	66.000	91.200	27.900	19.530	-
Pakuan Ratu A	Pakuan Ratu A	600	18.200	10.920	12.617	4.300	3.010	-
Gedong Aji II/EI	Gedong Aji A1,2 dan Gedong Aji E1, E2, E3	4.350	123.000	73.800	101.113	31.100	21.770	-
T O T A L		27.500	779.200	447.520	631.830	196.500	137.550	-

## 7. Jaminan Hidup.

Distribusi jaminan hidup untuk para Translok telah disiapkan 1 minggu sebelum Translok dibe - rangkatkan.

Adapun Jaminan hidup yang akan diberikan adalah sebagai berikut :

- Beras = 30 Kg/ KK
- Minyak Tanah = 7 Ltr/KK
- Gula Pasir = 2 Kg /KK
- Ikan Asin = 2 Kg /KK
- Garam = 2 Kg /KK

Distribusi jaminan hidup tersebut sampai de - ngan situasi akhir Maret 1983 telah mencapai ma - sing-masing : Beras 46,8 %, Ikan Asin 48,79 % Garam 48,79 %, Gula Pasir 48.79 % dan Minyak tanah 42,83 %.

Secara terperinci dapat terlihat pada tabel (13).

**Tabel. 13**

TARGET DAN REALISASI DISTRIBUSI JAMINAN HIDUP DI - DAERAH TRANSLOK 1981/1982-1982/1983 (Situasi Maret 1983)

(dalam ribuan)

LOKASI	JUMLAH KK	JAMINAN HIDUP									
		Beras (Kg)		Ikan asin (Kg)		Garam (Kg)		Gula (Kg)		Minyak Tanah	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Mesuji A	1.900	684,0	431,784	45,6	70,726	45,6	30,726	45,6	30,726	156,6	104,200
Mesuji B	1.900	684,0	411,0	45,6	24,264	45,6	28,172	45,6	26,252	159,6	90,2
Mesuji D	1.600	576,0	288,131	38,4	17,888	38,3	15,3	38,4	15,7	134,4	56,16
Mesuji E	2.500	900,0	403,3	60,0	23,562	60,0	23,502	60,0	23,762	210,0	79,0
Menggala A	1.400	504,0	285,0	33,6	15,460	33,6	15,31	33,6	21,91	117,6	75,4
Menggala B	2.000	702,0	455,469	48,0	31,065	48,0	30,684	48,0	28,684	168,0	101,8
Paluan Ratu A	800	288,0	132,487	19,2	7,336	19,2	8,055	19,2	8,076	67,2	28,6
Paluan Ratu B	900	3,240,0	240,0	216,0	14,432	216,0	14,846	216,0	14,846	75,6	51,2
Paluan Ratu C	1.350	486,0	185,0	32,40	9,34	32,4	9,34	32,4	9,34	112,1	31,4
Paluan Ratu D	800	288,0	120,0	19,2	5,8	19,2	5,8	19,2	5,8	67,2	17,4
Negara Ratu A	600	216,0	116,8	14,4	7,994	14,4	7,994	14,4	8,009	50,4	29,8
Negara Ratu B	900	324,0	176,7	216,0	8,128	216,0	8,128	216,0	8,128	75,6	29,40
Elambangan Umpu A	900	324,0	209,0	216,0	11,082	216,0	11,802	216,0	11,802	75,6	47,00
Elambangan Umpu B	900	324,0	210,0	216,0	13,806	216,0	13,806	216,0	13,806	75,6	46,980
Elambangan Umpu C	1.700	612,0	285,829	40,8	21,260	40,8	19,452	40,8	19,452	142,8	63,4
Gedong Aji II/A1	900	324,0	138,0	216,0	6,8	216,0	6,8	216,0	6,8	75,6	24,2
Gedong Aji II/A2	900	324,0	115,0	216,0	5,8	216,0	5,8	216,0	5,8	75,6	20,4
Gedong Aji II/B1	850	305,0	80,0	204,0	6,052	204,0	6,052	204,0	6,052	71,4	21,4
Gedong Aji II/B2	900	324,0	96,0	216,0	4,8	216,0	4,8	216,0	4,8	75,6	16,2
Gedong Aji II/B3	800	288,0	75,0	19,2	5,488	19,2	5,488	19,2	5,488	67,2	19,2
<b>J U M L A H</b>	<b>26,500</b>	<b>9,540,0</b>	<b>4,425,0</b>	<b>636,0</b>	<b>310,287</b>	<b>636,0</b>	<b>269,247</b>	<b>636,0</b>	<b>274,633</b>	<b>2,226</b>	<b>953,340</b>



TEMPAT PEMBIBITAN KELAPA HYBRIDA DI MESUJI A SIAP SALUR  
BULAN DESEMBER 1983. ( GAMBAR 13 ).



TEMPAT PEMBIBITAN CENGKEH DI MESUJI A UNTUK DISALURKAN PADA PARA  
TRANSLOK YANG DIRENCANAKAN PENYALURANNYA BULAN  
DESEMBER 1983. ( GAMBAR 14 ).

## 8. Pengukuran Kapling/Pembagian Lahan Usaha.

Pengukuran kapling terus dilakukan untuk men-  
capai target masing-masing 27.250 buah lahan pe-  
karangan, lahan usaha I dan lahan usaha II. Dari  
target masing-masing 27.250 tersebut, pada situa-  
si 30 Maret 1983 telah terealisasi masing-  
masing 28.125 buah lahan perkarangan (103,41 %) buah  
lahan usaha II (56,90 %) secara terperinci ter-  
lihat pada tabel ( 14 ).

Tabel 14. TARGET DAN REALISASI PERKAPLINGAN LAHAN PEKARANGAN  
DAN LAHAN USAHA I, II 1981/1982 - 1982/1983  
( Situasi 30 Maret 1983 )

L O K A S I	Pekarangan		Kapling Lahan Usaha I		Kapling Lahan Usaha II	
	Kupling Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Mesuji A	2.400	1.900	2.400	1.900	2.400	11
Mesuji B	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Mesuji D	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	1.200
Mesuji E	2.000	2.700	2.000	1.850	2.000	1.850
Menggala B	-	2.150	-	1.800	-	1.800
Menggala C	2.000	3.150	2.000	2.438	2.000	-
Negara Ratu A	600	708	600	600	600	600
Negara Ratu B	1.150	1.100	1.150	1.000	1.150	600
Pakuan Ratu A	1.050	725	1.050	275	1.050	350
Pakuan Ratu B	2.000	1.704	2.000	966	2.000	800
Pakuan Ratu C	1.300	1.110	1.300	1.110	1.300	1.017
Pakuan Ratu D	800	1.128	800	1.080	800	600
Blambangan Umpu A	1.300	1.100	1.300	1.000	1.300	-
Blambangan Umpu B	1.700	1.350	1.700	1.167	1.700	1.050
Blambangan Umpu C	1.700	1.350	1.700	1.350	1.700	1.350
Gedong Aji A1	900	900	900	880	900	500
Gedong Aji A2	900	900	900	825	900	600
Gedong Aji B1	850	850	755	850	850	600
Gedong Aji B2	900	900	900	795	900	630
Gedong Aji B3	800	800	800	634	800	-
T O T A L	27.250	28.125	27.250	24.015	27.250	15.477

Dari uraian yang tertera dalam tabel tersebut diatas nampaknya pada realisasi pada lahan pekarangan sudah mencapai lebih dari target yaitu 28.125 buah hal ini berarti bahwa diantara lokasi penempatan translok tersebut, pemborong sudah melaksanakan cicilan pekerjaan untuk tahun anggaran 1983/1984. Lihat gambar(11, 12, 13 dan 14)

## PELAKSANAAN PEMINDAHAN TRANSLOK 1983/1984

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung untuk calon Translok yang akan dipindahkan telah ditetapkan dengan SK No. INST/015/Bappeda/ HK / 1983 tanggal 15 Agustus 1983 dengan jumlah pemindahan :

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Lampung Utara   | 1.369 KK |
| 2. Lampung Tengah  | 8.955 KK |
| 3. Lampung Selatan | 1.426 KK |

Perincian pemindahan tertera pada tabel (Lamp.1)

Daerah pengiriman dan daerah penerima telah siap untuk dapat melaksanakannya.

Pelaksanaan Translok sampai dengan akhir Pelita III diharapkan mencapai sasaran yang ditentukan.

Pembinaan terus dilakukan dengan monitor permasalahan yang timbul di daerah Translok dan Resettlement, baik berkenaan dengan perkembangan sosial ekonomi penduduk / yang dipindahkan dan masalah kesehatan penduduk, maupun berkenaan dengan perkembangan desa.

Disamping itu pembinaan daerah yang ditinggalkan dengan melakukan pengawasan ketat bagi penduduk yang masuk ke daerah kawasan hutan terutama daerah yang telah dikosongkan, dan dengan melakukan reboisasi, dengan demikian fungsi hutan untuk kepentingan pembangunan dapat tetap terpelihara.

Pembinaan lanjut bagi daerah Translok dalam kaitannya dengan pengembangan daerah dengan dikembangkannya proyek-proyek irigasi, teknis daerah pasang surut, perkebunan dan pengembangan perhubungan Regional.



PERUMAHAN TRANSMIGRASI LOKAL MESUJI A ( GAMBAR 15 ).



PERUMAHAN TRANSLOK DI MESUJI DENGAN LATAR BELAKANG  
LAHAN USAHA II YANG BELUM DI BUKA  
( GAMBAR 16 ).





PERUMAHAN TRANSMIGRASI LOKAL MESUJI A ( GAMBAR 15 ).



PERUMAHAN TRANSLOK DI MESUJI DENGAN LATAR BELAKANG  
LAHAN USAHA II YANG BELUM DI BUKA  
( GAMBAR 16 ).

## KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Trans migrasi umum, sampai dengan awal Pelita III, pelak - sanannya dikelola oleh Dirjen Transmigrasi dan Di - nas/Instansi/Lembaga lain.

Sedang sejak awal Pelita III, pelaksanaan Trans - migrasi dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan mela - lui program Resettlement dengan pola BAKORESDA, dan dilanjutkan dengan program Transmigrasi lokal (Trans lok ) dengan pola Satuan Pembinaan Transmigrasi ( SATBINTRANS ).

Jumlah Transmigrasi yang didatangkan baik mela - lui Ditjen Transmigrasi, maupun Dinas/Instansi/Lem - бага lain sampai dengan awal Pelita III, sebanyak - 106.491 KK atau 441.396 jiwa untuk lebih jelasnya tertera pada tabel ( 15 ).

Tabel. 15

No.	Dinas/Instansi/ Lembaga	J u m l a h		Keterangan
		KK	J i w a	
1.	Dirjen Transmigrasi	57.988	221.386	sebelum Pe - lita.
2.	Dinas/Instansi/Lem - бага	15.241	71.945	AD/AU/Polri Sosial/Pra - muka.
3.	Dirjen Transmigrasi	19.711	86.003	Pelita. I
4.	Dirjen Transmigrasi	13.551	62.062	Pelita II
J U M L A H		106.491	441.396	

Pelaksanaan Transmigrasi umum di daerah Lampung sangat terpengaruh terhadap pembangunan pertanian dan peningkatan produksi pertanian, baik perluasan areal dan peningkatan produksi pertanian pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan, maupun pertambahan, pembangunan sektor lainnya merupakan pendukung sektor pertanian.

Pengaruh lain adalah tidak terelakkan Transmigrasi spontan masuk ke Daerah Lampung dan terbukanya kawasan hutan, yang berarti keseimbangan lingkungan terancam rusak.

Kerusakan hutan tidak saja mengakibatkan kurang tercapainya sasaran pembangunan irigasi/pertanian, tetapi juga akan punah binatang yang dilindungi yang ada di Daerah Lampung.

Justru dalam rangka usaha mempertahankan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejak awal Pelita III ditetapkan program Resettle - ment dan dilanjutkan dengan program Translok, dengan maksud untuk memindahkan penduduk yang bermukim dan berusaha tani di kawasan hutan dan pelaksanaan pemin dahan sampai dengan 31 Maret 1983 telah terealisasi sejumlah 31.028 KK, dan sampai dengan akhir Pelita - III akan dapat dipindahkan sejumlah 50.000 KK dari kawasan hutan.

Mekanisme pelaksanaan Resettlement dan TRANSLOK melalui pola BAKOSERDA dan SATBINTRANS dengan sistim koordinasi antar Dinas/Instansi dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung selaku Ketua Koordinator pelaksanaan Resettlement dan Translok.

Dinas/Instansi Tingkat I dan Bupati/KDH Tk. II bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung, koordinasi pelaksana tidak saja pada Ting - kat I, tetapi sampai pada tingkat Kecamatan, dimana Camat sebagai Koordinator pelaksana pendaftaran

penduduk yang dipindahkan dan sebagai koordinator pengamanan wilayah yang dikosongkan.

Sedangkan mekanisme Transmigrasi umum, dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang bersangkutan dan kurang terlihat koordinasi antar dinas/instansi dalam kaitan pembangunan Transmigrasi. Dirjen Transmigrasi melaksanakan pembinaan desa dan masyarakat Transmigrasi selama 5 tahun sejak ditempatkan sampai diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Setelah mereka diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan telah menerima sertifikat lahan, Dinas/Instansi lain melanjutkan pembinaan, seperti kredit pola PRPTE dan SCDP untuk kelapa Hyberida dan kelapa dalam, pola Bimas dan Inmas, kesehatan dan pembinaan lainnya.

Pelaksanaan Resettlement dilaksanakan tahun - 1979/1980 dan telah memindahkan penduduk sejumlah 5.017 KK, dengan ditunjang dana dari BANPRES, Ditjen BANGDES, dan APBD.

Tahun 1981/1982 - 1982/1983 pelaksanaan Translok dan telah memindahkan penduduk dari kawasan hutan sejumlah 26.001 KK dengan ditunjang dana dari Dirjen Transmigrasi, PU, Agraria, Pertanian, Kesehatan dan Inpres. Pada saat ini melalui pembinaan Pemerintah, warga Translok telah pula menetapkan desa masing-masing dan telah terdapat 42 desa, walaupun masih harus dilengkapi perangkatnya melalui pembinaan Ditjen BANGDES.

Selain itu usaha pembinaan teknis Pertanian, Perkebunan, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, dan lain sebagainya terus dilakukan. Walau demikian pada kegiatan program Transmigrasi lokal sampai dengan tahun 1982/1983 ada beberapa hal yang menjadi masalah, meskipun telah diusahakan pemecahannya.

## MASALAH DAN UPAYA PEMECAHANNYA

1. Sertifikasi lahan yang telah disiapkan oleh Agraria belum diterima oleh warga Translok, baru 46,13 %, salah satu hambatan utama dalam pembagian adalah warga Translok seringkali tidak berada ditempat pada saat pembagian sertifikat karena pada umumnya mereka sedang kembali ketempat asal untuk memungut hasil panen.

Untuk memecahkan hal tersebut telah ditetapkan bahwa pembagian lahan kepada warga Translok dilakukan minimal setiap hari ( seminggu sekali).

Hal tersebut harus ditaati baik oleh petugas maupun warga Translok dan diharapkan hal ini dapat mengikat warga Translok untuk suatu pertemuan mingguan.

2. Terlihat tanda-tanda warga Translok cenderung akan kembali kekawasan hutan lindung (lokasi asal) karena berbagai hal terutama prospek hasil panen mereka dilokasi asal.

Pengawasan dilakukan dengan memperketat administrasi baik di daerah penerima maupun daerah asal, seperti surat keterangan jalan, kepada warga Translok yang akan memetik hasil panen.

3. Hasil panen Padi Gogo pada umumnya kurang memuaskan karena serangan hama dan penyakit tanaman terutama Wereng, Kepinding tanah dan Busuk Pelepah.

Produktivitas turun dan mencapai kurang dari 0,5 ton/Ha, untuk selanjutnya diusahakan pengendalian.

dalian hama yang lebih terpadu yaitu dengan penggunaan bibit tahan Wereng pada paket saprodi, penyemprotan serta penanaman yang secara serempak .

4. Pada beberapa tempat kawasan hutan lindung yang dikosongkan, dilaporkan telah mulai dimasuki lagi oleh penyerobot-penyerobot hutan.

Untuk hal tersebut, telah dimulai usaha-usaha pengamanan atas daerah yang ditinggalkan dan tahap awal pengamanan hutan tersebut dikaitkan dengan pola pengamanan teritorial

Selain itu pembinaan melalui penyuluhan terus dilakukan secara serentak khususnya bagi Translok yang sudah diberangkatkan, dan pengawasan hutan dilakukan melalui koordinasi Camat setempat, untuk melakukan penataan bagi penduduk yang keluar dan masuk daerah kawasan.

5. Usaha mengatasi penduduk yang bermukim dan berusaha tani pada kawasan hutan, dilakukan inventarisasi dan pendaftaran yang lebih intensif melalui tahapan penyuluhan dengan prioritas didaerah kawasan hutan dan penduduk yang terkena proyek strategis.
6. Untuk mengatasi ketepatan musim panen bagi penduduk yang ditempatkan didaerah penerima, dengan menyusun langkah-langkah lebih cermat, agar penempatan penduduk yang dipindahkan berdekatan dengan waktu musim tanam.
7. Usaha pembinaan Translok dilakukan melalui ke terpaduan program antar Dinas/Instansi di daerah penerima dengan koordinasi Gubernur/KDH Tingkat I Lampung.

8. Usaha mengatasi kekurangan tenaga pendidik didaerah penerima sehubungan dengan anak usia sekolah yang ada didaerah Translok, dilakukan pengangkatan guru Inpres dengan prioritas penempatan didaerah Translok.
9. Dalam pelaksanaan Translok selalu timbul masalah, baik di daerah penerima maupun di daerah pengirim.

Hal tersebut dirumuskan melalui rapat-rapat Satbintrans I/II untuk menentukan ketetapan langkah yang diambil dan untuk lebih peka terhadap kebijaksanaan yang diputuskan bagi pemecahan masalah yang timbul.

## INSTRUKSI GUBERNUR KDH TK I LAMPUNG

NOMOR : INST/015/Bappeda/HK/1983

T E N T A N G  
CALON TRANSMIGRASI LOKAL DARI MASING-MASING DAERAH  
TK II SE PROPINSI DATI I LAMPUNG UNTUK PENEMPATAN  
TAHUN 1983/1984

DATI II/Kec.	D e s a	Jumlah KK	Keterangan
<u>Lampung Utara</u>			
- Menggala	Bakung Ilir	792 KK	Trans sisipan yang di ta ta kembali ( Eks Gn,Ba - lak ).
- Tulang Bawang Tengah	Eks Way Abung III	477 KK	Okupasi didaerah Trans. Way Abung.
- Tanjung Raja	Karang Sari	100 KK	Register 34
	Jumlah	1.369 KK	
<u>Lampung Tengah</u>			
- Way Jepara	Karang Sari	487 KK	Register 9 Way Kambas
	Sidodadi	51 KK	i d e m
	Sidomulyo	27 KK	i d e m
	Ponorogo/Braja-Harjosari	542 KK	i d e m
	Botol/Braja Luhur	459 KK	i d e m
	Koperta	450 KK	i d e m
- Lb. Maringgai	Pasir Panjang/Mar gosari	148 KK	i d e m
- Sukadana	Susukan Baru	360 KK	i d e m
- Padang Ratu	Marga Jaya	1.887 KK	Register 34 Padang Ratu
	Lingga Pura	426 KK	i d e m
- Gunung Balak	Way Ambar	1.127 KK	Register 38 Gunung Balak
	Yabakti	287 KK	i d e m
	Ogan Jaya	1.099 KK	i d e m
	Bandung Jaya	725 KK	i d e m
	Sri Mulyo	880 KK	i d e m
	Jumlah	8.955 KK	
<u>Lampung Selatan</u>			
- Wonosobo	-	1.426 KK	Register 39
TOTAL PEMINDAHAN		11.750 KK	

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada Tanggal : 15 Agustus 1983

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG

dto

YASRI HADIBROTO



